

**TESIS**  
**KOMUNIKASI POLITIK MUI**  
**DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**(Studi Kasus Keterlibatan MUI dan Konflik Pilkades**  
**di Desa Bojong Kulur, Gunung Putri, Bogor)**



**Disusun Oleh:**

**Ayu Ismatul Maula**

**NIM. 19202010004**

**MAGISTER KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Ismatul Maula  
NIM : 19202010004  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bogor, 26 Mei 2021

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVER  
SUNAN KALIJAYAN  
YOGYAKARTA



## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Ismatul Maula  
NIM : 19202010004  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bogor, 09 Juli 2021

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERS  
SUNAN KALIJ  
YOGYAKARTA



Ayu Ismatul Maula



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-916/Un.02/DD/PP.00.9/06/2021

Tugas Akhir dengan judul : Komunikasi Politik MUI dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Keterlibatan MUI dan Konflik Pilkades di Desa Bojong Kulur, Gunung Putri ,Bogor)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AYU ISMATUL MAULA, S. Sos  
Nomor Induk Mahasiswa : 19202010004  
Telah diujikan pada : Senin, 31 Mei 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I  
Dr. Hamdan Daulay, M.Si., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 60b7840cd492



Penguji II  
Dr. H. M. Kholili, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 60e501144884e



Penguji III  
Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.  
SIGNED

Valid ID: 60e5371ce7495



Yogyakarta, 31 Mei 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.  
SIGNED

Valid ID: 60e53f1ce1dd2

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,  
Ketua Program Studi Magister  
Komunikasi dan Penyiaran Islam,  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul : **Komunikasi Politik MUI dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Keterlibatan MUI dan Konflik Pilkades di Desa Bojong Kulur, Gunung Putri, Bogor)** oleh :

Nama : Ayu Ismatul Maula  
NIM : 19202010004  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi  
Jenjang : Magister (S2)  
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Sosial.

Wassalamu'alaikum. wr. wb.

Yogyakarta, 26 Mei 2021  
Pembimbing



Dr. Hamdan Daulay, M.Si., M.A.

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Tesis ini peneliti persembahkan teruntuk  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi serta Program Studi Magister  
Komunikasi Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



## MOTTO

**“Hidup yang dihabiskan untuk membuat kesalahan tidak hanya jauh lebih mulus, tetapi juga lebih berguna daripada hidup yang dihabiskan tanpa melakukan apapun”**

**(George Bernard Shaw)**



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah-Nya kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “Komunikasi Politik MUI dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Keterlibatan MUI dan Konflik Pilkades di Desa Bojong Kulur, Gunung Putri, Bogor)”. Sholawat serta salam senantiasa peneliti haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia dari zaman kebodohan menuju zaman ilmu pengetahuan.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan berbagai pihak, baik yang berupa moril, materiil maupun spiritual. Untuk itu peneliti mengucapkan banyak terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M.A..
2. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Hj. Marhumah, M. Pd.
3. Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing Tesis, Dr. Hamdan Daulay, M.Si., M.A yang dengan sabar membimbing, mengarahkan dan memotivasi peneliti.
4. Dosen Pembimbing Akademik, Dr. HM. Kholili, M. Siyang dengan sabar membimbing, mengarahkan dan memberi motivasi kepada peneliti.
5. Para dosen Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam yang telah memberikan ilmunya selama dalam masa perkuliahan.



6. Para Tokoh MUI yang telah bersedia menjadi obyek penelitian dan berkenan memberikan informasi selama proses penelitian.
7. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak HM. Thohirin Dharma, S. Pd. I dan Ibu Hj. Halimah Manshur yang selalu membimbing dan mendoakan penulis. Serta Adik-adikku, Dede Ri'ayatul Muamalah dan Umar Hafidz Ubaidillah yang terus memotivasi dan memberikan dukungan materiil, moril maupun spiritual kepada peneliti.
8. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q Krapyak, Ibu Nyai Hj. Khusnul Khotimah Warsun berserta keluargayang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan bagi peneliti.
9. Segenap Asatidz dan Ustadzah di Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q, khususnya Bapak Abdul Hadi, Abah Fairuz dan Abah Kholid yang senantiasa mendoakan dan menyemangati peneliti.
10. Sahabat-sahabat terbaik, Ikfi Nuril, Nurin Hidayati, Agni Moyassaroh Qonia, Rohmatun Nafi'ah, Lia Salma Badi'ah, M. Izzat Firdausi,terimakasih telah berjuang bersama, saling menyemangati dan memberi motivasi.
11. Segenap teman-teman Komplek Q khususnya angkatan 2014 dan penghuni kamar atlantis yang memberikan semangat untuk terus berjuang dan pantang menyerah.
12. Segenap teman seperjuangan di jurusan Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam angkatan 2019, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
13. Dan semua pihak yang telah bersedia membantu dalam penelitian tesis ini yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu.

Kepada mereka peneliti hanya bisa memanjatkan doa kepada Allah SWT, semoga kebaikan dan bantuan dalam segala

bentuk, jenis dan jumlahnya mendapatkan balasan dan imbalan yang jauh lebih baik, mendapatkan keberkahan dan keridloan dari Allah SWT. Semoga penelitian ini mendapat berkah dan bermanfaat bagi semua. Amiin.

Yogyakarta, 09 Juli 2021



Ayu Ismatul Maula.



## ABSTRAK

Keterlibatan para tokoh agama dan masyarakat pada sebuah kegiatan politik bukanlah hal yang asing lagi saat ini. Banyaknya para tokoh agama dan masyarakat yang terjun pada dunia politik sudah pasti memiliki tujuan yang berbeda, seperti halnya pilkades yang terjadi di Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Di desa ini, banyak tokoh agama dan masyarakat yang bergabung dalam kegiatan pilkades dan tersebar pada setiap kubu calon kepala desa. Keterlibatan para tokoh agama dan masyarakat menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik antar kubu calon kepala desa sehingga menyebabkan perseteruan diantara masyarakat desa tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjabarkan keterlibatan tokoh MUI dalam kegiatan politik pemilihan kepala desa. Adapun rumusan masalah diantaranya adalah: Bagaimana keterlibatan tokoh MUI dalam pilkades Desa Bojong Kulur? Bagaimana komunikasi dakwah yang dilakukan oleh tokoh MUI dalam meminimalisir konflik pilkades? Dan, strategi dakwah apa yang digunakan oleh tokoh MUI dalam meminimalisir konflik Pilkades di Desa Bojong Kulur? Untuk mengetahui keterlibatan tokoh MUI dalam kegiatan pilkades, peneliti menggunakan teori komunikasi politik untuk mengetahui keterlibatan para da'i, menggunakan teori konflik sosial untuk mengetahui macam-macam konflik yang terjadi di desa Bojong Kulur, dan menggunakan teori komunikasi dakwah untuk mengetahui komunikasi yang dilakukan oleh para da'i juga mengetahui strategi dakwah yang digunakan oleh para da'i.

Hasil penelitian ditemukan bahwa komunikasi politik para tokoh MUI pada kegiatan pilkades sebagai tim sukses, pendukung dan penasihat saja, tidak sebagai calon kepala desa. Sedangkan keterlibatannya sebagai para komunikator yang menempati posisi politikus dan aktivis pemuka pendapat. Komunikasi dakwah yang dilakukan oleh MUI dengan cara memberikan pengetahuan dan nasihat seputar politik kepada masyarakat dan melakukan berbagai macam strategi dakwah guna meminimalisir konflik yang terjadi di masyarakat.

**Kata Kunci** : Da'i, Konflik Sosial, Keterlibatan Politik, Strategi Dakwah.

## ABSTRACT

The involvement of religious and community leaders in a political activity is not something strange at this time. The religious and community leaders who are involved in politics certainly has different goals, such as the village head election that took place in Bojong Kulur, Gunung Putri, Bogor. In this village, many religious and community leaders have joined the Pilkades activities and are scattered in each camp of the village head candidates. The involvement of religious and community leaders is one of the causes of conflict between the camps of the candidate for village head, which causes feuds among the village community.

This study uses a qualitative research method with a case study approach that aims to describe the involvement of MUI figures in the political activities of village head elections. The formulations of the problem include : How is the political communication of MUI in the pilkades at Bojong Kulur village? How where the MUI figures involved in the Pilkades of Bojong Kulur village? How is the dakwah communication carried out by MUI figures in minimizing pilkades conflict? And, what dakwah strategies are used by MUI figures in minimizing pilkades conflict in Bojong Kulur village? To find out the involvement of MUI figures in Pilkades activities, researchers used political communication theory to determine the involvement of preachers, used social conflict theory to find out the kinds of conflicts that occurred in the village, and used dakwah communication theory to find out the communication carried out by preachers also know the dakwah strategies used by the preachers.

The result of the study found that the political communication of MUI figures during the pilkades activity was as a success team, supporters and advisors only, not as a candidate for village head. Meanwhile, his involvement as a communicator who occupies the position of politician and opinion leader activist. Da'wah communication is carried out by MUI by providing knowledge and advice about politics to the community and carrying out various kinds of da'wah strategies in order to minimize conflicts that occur in the community.

**Keyword:** Da'i, Social Conflict, Political Involvement, Da'wah Strategy.

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN ... ..	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
PENGESAHAN TESIS.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
MOTTO .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK .....	xi
ABSTRACT .....	xii
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL .....	xvii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Batasan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
E. Tinjauan Pustaka .....	8
F. Landasan Teori.....	20
G. Metode Penelitian .....	47
H. Sistematika Pembahasan .....	55
I. Kerangka Berfikir .....	56

## **BAB II. GAMBARAN UMUM TOKOH MUI**

A. Gambaran Umum Tokoh MUI.....	57
B. Program Kerja Tokoh MUI.....	60
C. Situasi Politik Pilkades.....	66

## **BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Keterlibatan MUI dalam Politik Pilkades.....	70
B. Komunikasi Politik MUI.....	90
C. Konflik Pilkades.....	92
D. Komunikasi Dakwah MUI.....	103
E. Strategi Dakwah MUI.....	104
F. Hasil Analisis.....	132
1. Hasil temuan ditinjau dari Komunikasi Politik.....	133
2. Hasil temuan ditinjau dari Level Konflik.....	135
3. Hasil temuan ditinjau dari Strategi Dakwah.....	135

## **BAB IV. PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	147
B. Saran.....	150

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kegiatan Pengajian Kaum Bapak .....	62
Gambar 2.2 Kegiatan Pengajian Anak-Anak .....	63
Gambar 2.3 Kumpul Bulanan MUI .....	64
Gambar 2.4 Arisan dan Bahtsul Masail MUI.....	64
Gambar 2.5 Perlombaan MTQ dan MHQ .....	65
Gambar 2.6 Kaderisasi Pemuda MUI.....	66
Gambar 2.7 Penentuan Cakades Terbaru .....	68
Gambar 3.1 Bapak Asep Mendampingi Cakades di Kantor Desa.....	73
Gambar 3.2 Cuplikan Video Dukungan Bapak Asep.....	75
Gambar 3.3 Doa sebelum Pendaftaran oleh Bapak Thohirin .....	78
Gambar 3.4 Pengajian yang dipimpin Bapak Afif .....	82
Gambar 3.5 Keterlibatan Bapak Halim saat Deklarasi.....	86
Gambar 3.6 Konfirmasi Kubu Bapak Firman .....	96
Gambar 3.7 Bukti Perusakan Baliho .....	98
Gambar 3.8 Adanya Benda Mitis di Rumah Cakades .....	99
Gambar 3.9 Konflik terkait Golput .....	101
Gambar 3.10 Strategi Dakwah Bapak Asep .....	107
Gambar 3.11 Strategi Dakwah Bapak Thohirin .....	111
Gambar 3.12 Strategi Dakwah Bapak Afif.....	116

Gambar 3.13 Strategi Dakwah Bapak Halim .....	119
Gambar 3.14 Strategi Dakwah Bapak Atin .....	123
Gambar 3.15 Strategi Dakwah Bapak Otong .....	125
Gambar 3.16 Kumpulan MUI Pasca Pilkada .....	131





## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Narasumber Penelitian.....	50
Tabel 2.1 Susunan Anggota MUI.....	60
Tabel 3.1 Keterlibatan Tokoh MUI .....	133
Tabel 3.2 Strategi Dakwah: Melakukan Riset .....	138
Tabel 3.3 Strategi Dakwah: Membuat Diagnosis Penyelesaian .....	139
Tabel 3.4 Strategi Dakwah: Menetapkan Tujuan dan Sasaran .....	141
Tabel 3.5 Strategi Dakwah: Bekerja sama dengan Tokoh Lain .....	142
Tabel 3.6 Strategi Dakwah: Melakukan Pendekatan.....	143
Tabel 3.7 Strategi Dakwah: Membuat Forum Diskusi .....	145



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Da'i atau Pelaku dakwah memiliki tugas untuk mensyiarkan ajaran agama Islam kepada masyarakat luas agar bertambahnya wawasan masyarakat tentang agama Islam dan bisa diamalkan dengan baik. Saat ini, da'i tidak hanya berfokus untuk mensyiarkan agama Islam, tetapi juga banyak para da'i yang terjun pada kegiatan politik, wirausaha, dan lain sebagainya.

Yusril Ihza Mahendra selaku guru besar hukum dan ketum PBB pada kegiatan sarasehan internasional di Pondok Pesantren Daar el-Qolam mengajak para santri, kiai, ulama dan tokoh agama lainnya untuk turut serta terjun pada kegiatan politik dengan alasan agar perjuangan para santri, kiai, ulama dan tokoh agama lainnya tidak hanya di pesantren saja, tetapi harus menembus gedung parlemen dan pemerintahan.<sup>1</sup>

Para santri, kiai dan ulama saatnya memunculkan diri mereka pada dunia dengan cara mengikuti kegiatan yang mereka sukai seperti halnya bergelut pada kegiatan sosial, kegiatan politik, kegiatan budaya maupun kegiatan lainnya. Para santri,

---

<sup>1</sup> Trans, "Ulama & Tokoh Agama, Darurat Terjun ke Dunia Politik, Jangan Hanya jadi Penonton", diakses dari <https://www.transbojonegoro.com/2018/03/para-santri-ulama-dan-tokoh-agama-darurat-terjun-ke-dunia-politik-jangan-hanya-jadi-penonton/>, pada tanggal 15 Januari 2021 puku 11.20 WIB

kiai dan ulama juga berhak terjun pada kegiatan positif lainnya selain kegiatan di pesantren, hal tersebut guna menambah wawasan dan pengalaman agar mereka tidak merasa asing ketika sudah diharuskan terjun ke masyarakat.

Saat ini, para da'i tidak hanya terjun sebagai pelaku politik, tetapi banyak juga para da'i yang menjadi tim sukses dari berbagai kubu baik pada kegiatan pemilu, pilkada maupun pilkades. Rudi Subiyakto dalam Jurnal Ilmu Politik Ilmu Pemerintahan memaparkan Keterlibatan Kiai dalam Pilkada (Studi Kasus Pilkada di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006) sebagai bentuk kemampuan para Kiai bisa menciptakan kondisi politik yang kondusif dan peran mereka dalam kegiatan politik sangat menentukan dalam menciptakan masyarakat yang partisipatif.<sup>2</sup> Keterlibatan para kiai dalam Pilkada di Banjarnegara juga terjadi di Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor dalam ajang pemilihan kepala desa.

Pemilihan kepala desa yang sering disingkat pilkades merupakan pesta demokrasi bagi masyarakat untuk memilih kepala desa yang diselenggarakan setiap satu kali dalam kurun waktu enam tahun. Sesuai dengan ketentuan Permendagri 112 tahun 2014 yang membahas tentang pemilihan kepala desa diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 46 Peraturan

---

<sup>2</sup>Rudi Subiyakto, *Keterlibatan Kiai dalam Pilkada (Studi Kasus Pilkada di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006)*, Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 01, No. 01, Tahun 2011.

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa yang menyatakan perlu adanya menetapkan Permendagri tentang Pemilihan Kepala Desa.<sup>3</sup>

Seperti halnya Kabupaten Bogor, Pemerintah Kabupaten Bogor akan menggelar Pilkades yang diikuti oleh 88 desa di 34 kecamatan<sup>4</sup> termasuk desa Bojong Kulur yang terletak di kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Desa Bojong Kulur ialah desa yang terletak di bagian timur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor. Desa ini memiliki penduduk kurang lebih berjumlah 52.000 jiwa dengan luas wilayah kurang lebih 477.977 hA.

Pilkades yang diselenggarakan di Desa Bojong Kulur menimbulkan beberapa konflik yang terjadi pada masyarakat seperti beberapa kubu dari calon kepala desa saling berebut tokoh masyarakat dan beberapa tokoh agama, ujaran kebencian juga adu domba diantara pendukung kubu calon kepala desa. Tokoh agama dimanfaatkan oleh pasangan calon (paslon) pilkades agar tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) desa dan beberapa tokoh agama lainnya bisa berkoalisi dengannya. Sebab tokoh agama merupakan panutan bagi masyarakat sehingga diharapkan tokoh

---

<sup>3</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 112 Tahun 2014 *tentang Pemilihan Kepala Desa*, Bab 2 Pasal 3.

<sup>4</sup>Antara dan Juli Hantoro, "Pemkab Bogor tetap Gelar Pilkades Serentak 2020", diakses dari <https://metro.tempo.co/read/1376284/pemkab-bogor-tetap-gelar-pilkades-serentak-2020>, pada tanggal 27 November 2020 pukul 09.50.

agama dapat mengajak masyarakat untuk memilih pasangan calon Pilkades tersebut.

Keterlibatan para tokoh MUI dalam kegiatan pilkades menjadi salah satu penyebab timbulnya konflik di masyarakat. Tiga kubu saling berlomba dengan sikap yang tidak kompetitif dalam memperebutkan tokoh MUI dan tokoh-tokoh agama lainnya. Konflik tersebut menimbulkan dampak perseteruan, perepecahan, ketegangan, sikap resistensi dan sikap yang kurang kompetitif dari ketiga calon pilkades. Hal ini diperparah dengan kondisi negara yang mengalami wabah Pandemi Covid-19, sehingga ketentraman masyarakat menjadi terganggu.

Sedangkan di sisi lain, seorang pemuka agama atau tokoh agama meliputi Majelis Ulama Indonesia (MUI), kyai dan ustadz adalah *pioneer* masyarakat dalam pemberdayaan dalam masalah agama. Menurut Sayyid Quthub, tugas pendakwah hakikatnya adalah menyebarkan ajaran agama islam yang tidak hanya secara lisan tetapi disertai keteladanan dan perbuatan nyata.<sup>5</sup> Dakwah merupakan upaya para da'I untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik dengan cara meyakini juga mengaplikasikan ajaran dan nilai islam sehingga hidupnya

---

<sup>5</sup>Baharuddin Ali, 2014, *Tugas dan Fungsi Dakwah dalam Pemikiran Sayyid Quthub*, Jurnal Dakwah Tabligh, Vol. 15, No. 1, hal. 128.

menjadi lebih baik, hak asasinya terlindungi, bahagia, dan sejahtera.<sup>6</sup>

Dari identifikasi masalah diatas, maka pendakwah atau tokoh agama di desa Bojong Kulur tidak hanya bisa melakukan kegiatan dakwah tetapi juga turut serta terjun pada kegiatan lain seperti politik yang kehadirannya bisa mendamaikan atau mengurangi konflik yang terjadi pada tiga kubu paslon dan masyarakat. Masyarakat yang memiliki ketergantungan pada tokoh agama menyebabkan para tokoh agama memiliki kewajiban untuk meminimalisir konflik yang terjadi demi terciptanya masyarakat yang sejahtera sesuai dengan tuntunan islam. Oleh karena itu, fokus masalah yang akan diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui keterlibatan tokoh MUI dalam pilkades, komunikasi dakwah yang dilakukan oleh tokoh MUI dan mengkaji strategi dakwah yang digunakan oleh para tokoh MUI dalam meredakan dan menyelesaikan konflik politik.

Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan guna sebagai gagasan yang bersifat solutif untuk para pendakwah dalam melakukan dakwah di Desa BojongKulur. Perlu bagi pendakwah dalam melakukan dakwah yang ramah. Dakwah yang efektif dan efisien akan berdampak pada perubahan dari konflik calon pilkades. Harapannya kegiatan pilkades desa Bojong Kulur

---

<sup>6</sup>Andy Dermawan dkk, *Metodologi Ilmu Dakwah*, Yogyakarta: Lesfi, 2002, hal. 9.

dapat terselenggara dengan aman, kompetitif dan masyarakatnya sejahtera.

#### **A. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, ditemukanlah empat rumusan masalah, yakni:

1. Bagaimana keterlibatan politik tokoh MUI dalam pilkades di Desa Bojong Kulur?
2. Bagaimana Komunikasi Politik Tokoh MUI dalam Pilkades di Desa Bojong Kulur?
3. Bagaimana komunikasi dakwah yang dilakukan oleh tokoh MUI dalam meminimalisir konflik pilkades?
4. Bagaimana strategi dakwah yang dilakukan tokoh MUI dalam meminimalisir konflik Pilkades di Desa Bojong Kulur?

#### **B. Batasan Masalah**

Pada penelitian ini peneliti membatasi permasalahan pada tiga calon kepala desa dari lima calon kepala desa yang ada. Hal tersebut dikarenakan:

1. Ketiga calon tersebut lebih akrab ditengah masyarakat dan memiliki pendukung yang sama banyaknya.
2. Kubu dari ketiga calon tersebut lebih sering berkonflik dibanding dua kubu calon lainnya.
3. Ketiga kubu tersebut memiliki pendukung agama lebih banyak daripada kedua kubu lainnya.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana keterlibatan tokoh MUI dalam pilkades, bagaimana komunikasi dakwah yang dilakukan oleh tokoh MUI dan strategi dakwah apa yang dilakukan oleh tokoh MUI dalam meminimalisir konflik pilkades di Desa Bojong Kulur.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti mengharapkan adanya kegunaan penelitian yang berupa kegunaan praktik dan teoritik.

#### **a. Kegunaan Teoritik**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan juga sebagai referensi ilmiah baik dalam jurnal online maupun referensi di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga khususnya Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

#### **b. Kegunaan Praktik**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pelaku dakwah agar dapat meningkatkan metode dakwah yang lebih sesuai dan bisa bermanfaat bagi khalayak. Selain itu, penelitian ini pula diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam pengembangan materi mengenai metode dakwah dan penyelesaian konflik, juga dapat diterapkan untuk peneliti dan para pelaku dakwah, umumnya untuk khalayak luas.



## E. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang keterlibatan dai dalam ranah politik sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan menggunakan berbagai macam fokus. Beberapa penelitian terdahulu diantaranya adalah:

Pertama, penelitian Ujang Mahadi yang berjudul “Komunikasi Politik Kiai pada Kampanye Pemilu” penelitian ini membahas tentang keterlibatan para kiai dan ulama pada dunia politik di Bengkulu, hal ini terlihat jelas dengan kegigihan para kiai dan ulama dalam memperjuangkan kebijakan yang berkaitan dengan agama saat sidang Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bengkulu.<sup>7</sup> Penelitian Ujang Mahadi berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, karena peneliti berfokus pada keterlibatan tokoh MUI dalam Pilkada dan konflik.

Kedua, penelitian Nurhadi dan Sunarso yang berjudul “Peran Kiai dalam Membangun Partisipasi Pemilih”. Penelitian ini membahas tentang peranan kiai dalam membangun partisipasi pemilih yang menghasilkan tiga peran kiai dalam politik, diantaranya adalah : kiai sebagai patron politik yang menjadi acuan dalam menentukan pilihan politik, kiai sebagai elit politik aktif dalam kepengurusan partai politik dan mobilisasi massa, dan kiai sebagai mediator

---

<sup>7</sup>Ujang Mahadi, “Komunikasi Politik Kiai pada Kampanye Pemilu”, Jurnal Addin, Vol. 9, No. 2, 2015.

politik yang menjadi penengah dalam konflik politik.<sup>8</sup> Penelitian Nurhadi dan Sunarso berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, karena peneliti berfokus pada keterlibatan tokoh MUI dalam pilkades dan penyelesaian atau meminimalisir konflik yang terjadi di Desa Bojong Kulur.

Ketiga, penelitian Rudi Subiyakto yang berjudul “Keterlibatan Kiai dalam Pilkada (Studi Kasus Pilkada di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006)”. Penelitian ini membahas tentang keterlibatan kiai dalam pilkada dan memberikan hasil keterlibatan kiai dalam pilkada 2006 terbagi menjadi dua, yakni kiai sebagai aktor dan kiai sebagai partisipan. Lalu dampak keterlibatan kiai dalam kegiatan pilkada di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2006 menuai hasil dampak bagi kandidat, dampak bagi kiai dan dampak bagi para santri.<sup>9</sup>

Keempat, penelitian Hamzah Khaeriyah yang berjudul “Dakwah dalam Bingkai Politik”. Penelitian ini membahas tentang dakwah yang berlangsung dalam kehidupan manusia juga termasuk dalam arena politik kenegaraan. Karena dalam pandangan islam, politik merupakan salah satu medium untuk mencapai tujuan dakwah, bukan sebaliknya yang mana dakwah dijadikan medium untuk mencapai tujuan politik,

---

<sup>8</sup>Nurhadi, dan Sunarso, “Peran Kiai dalam Membangun Partisipasi Pemilih”, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 3, No. 2, 2018.

<sup>9</sup>Rudi Subiyakto., Op. Cit.

karena dalam dakwah sendiri dapat membicarakan tentang metode dan teknik dakwah yang sudah tertulis di Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber utama untuk pedoman.<sup>10</sup>

Kelima, penelitian Suharto yang berjudul "Urgensi Komunikasi Politik Dakwah". Penelitian ini membahas tentang komunikasi politik dakwah yang tidak terlalu berbeda dengan proses komunikasi politik pada umumnya. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa para da'i atau *muballigh* harus mampu merencanakan desain rancangan aksi dakwahnya yang lebih terstruktur dan konkret, tidak hanya sekedar menyampaikan pesan-pesan dakwah melainkan dapat memberi pengaruh yang kuat terhadap pengambilan keputusan yang bisa bersinergi dengan kekuasaan, agar esensi komunikasi politik dakwah dapat terwujud sebagaimana mestinya.<sup>11</sup>

Keenam, penelitian Novi Maria Ulfah yang berjudul "Strategi dan Manajemen Dakwah LDII Kecamatan Tugu, Kota Semarang". Penelitian ini membahas tentang strategi dakwah dan manajemen dakwah yang dilakukan oleh Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa organisasi LDII dalam menjalankan dakwah islamnya disertai dengan rencana, program kerja, serta terdapat evaluasi proses

---

<sup>10</sup>Hamzah Khaeriyah, *Dakwah dalam Bingkai Politik*, Jurnal Tasamuh, Vol. 10, No. 1, April 2018.

<sup>11</sup>Suharto, *Urgensi Komunikasi Politik Dakwah*, Jurnal Dakwah Tabligh, Vol. 14, No. 1, Juni 2013.

kegiatan, dan dalam mengembangkan kegiatan dakwah islam, LDII menggunakan strategi pada bidang keagamaan dan olah raga.<sup>12</sup>

Ketujuh, penelitian Abdul Ghofur yang berjudul “Peran Ulama sebagai Resolusi Konflik Carok di Desa Kaliboto Kidul Kecamatan Jatiroto Lumajang”. Penelitian ini membahas tentang peran penting para ulama dalam menghadapi masyarakat yang akan melakukan *carok* (membela harga diri dengan cara kekerasan). Abdul Ghofur dalam penelitiannya berusaha meneliti tentang penyelesaian suatu masalah yang dilakukan dengan cara kekerasan (carok) yang sangat bertentangan dengan hukum islam. Selain itu, peneliti juga mencoba mencari tahu peran para ulama di Desa Kaliboto Kidul dalam menghadapi masyarakat yang ingin melakukan kegiatan carok tersebut. Hasil dari penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa para ulama memberikan nasihat kepada para pelaku carok yang akan *sowan* terlebih dahulu kepada para ulama, mencari tahu akar permasalahan yang terjadi para pelaku carok dan memberikan nasihat kepada masyarakat dan santrinya bahwa kegiatan carok hanya akan merugikan diri mereka sendiri.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Novi Maria Ulfah, *Strategi dan Manajemen Dakwah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kecamatan Tugu Kota Semarang*, Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 35, No. 2, 2015.

<sup>13</sup> Abdul Ghofur, *Peran Ulama Sebagai Resolusi Konflik Carok di Desa Kaliboto Kidul Kecamatan Jatiroto Lumajang*, Jurnal Dakwatuna, Vol. 05, No. 1, 2019.

Kedelapan, jurnal penelitian atas nama Ulin Nuha yang berjudul “Peran Politik Kiai dalam Proses Politik di Partai Politik (Studi Kasus Peran KH. A. Haris Shodaqoh di Partai Persatuan Pembangunan). Penelitian ini membahas tentang peran seorang kiai yang menjadi bagian penting dari perubahan sosial di masyarakat dan memiliki peran penting dalam mengubah peta kehidupan sosial masyarakatnya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh ulin nuha berupa peran politik KH. A. Haris Shodaqoh ialah dengan cara menerapkan prinsip *Amar ma'ruf nahi munkar* dengan cara memberikan pesan, nasihat kepada para pengurus harian PPP, selain itu uswah yang baik juga turut disertakan oleh KH. A. Haris Shodaqoh agar masyarakat bisa meniru hal-hal yang baik dan positif.<sup>14</sup>

Kesembilan, jurnal penelitian atas nama Lina Herlina yang berjudul “Perspektif Islam tentang Konflik Sosial: Analisis terhadap Kondisi Konflik Politik di Media Sosial”. Penelitian ini membahas tentang konflik-konflik yang terjadi pada ajang politik merupakan sebuah hal yang wajar terjadi, bahkan harus ada (terjadi) agar bisa dilakukan sebuah proses seleksi, dan dibutuhkan untuk proses sosialisasi di masyarakat. dalam ajaran islam, Al-Qur'an memberikan jalan

---

<sup>14</sup> Ulin Nuha, *Peran Politik Kiai dalam Proses Politik di Partai Politik (Studi Kasus Peran KH. A. Haris Shodaqoh di Partai Persatuan Pembangunan)*, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/160785-ID-peran-politik-kiai-dalam-proses-politik.pdf> pada Jum'at, 28 Mei 2021.

untuk menyentuh setiap permasalahan tersebut dari akar permasalahannya.<sup>15</sup>

Kesepuluh, jurnal penelitian Muhammad Fadli dan kawan-kawan yang berjudul “Keterlibatan Elit Lokal dalam Peningkatan Partisipasi Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara tahun 2015”. Penelitian ini membahas tentang para elit politik yang memainkan peran dalam kegiatan pemilihan bupati dan wakil bupati tidak lepas dari kepentingan untuk mensosialisasikan pasangan calon yang diusung oleh partai politik masing-masing. Keterlibatan mereka dalam kegiatan politik berupa menjadi tim kampanye, tim sukses, ataupun relawan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang mengkampanyekan ke masyarakat dengan berbagai macam cara. Keterlibatan elit lokal dalam pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati di Toraja Utara pada tahun 2015 memiliki dampak baik terhadap tingkat partisipasi masyarakat, hal ini dikarenakan sosialisasi informasi tentang pilkada yang disampaikan oleh para elit lokal dan penyelenggara.<sup>16</sup>

Kesebelas, penelitian Andi Rosa yang berjudul “Politik Dakwah dan Dakwah Politik di Era Reformasi Indonesia”.

---

<sup>15</sup> Lina Herlina, *Perspektif Islam tentang Konflik Sosial: Analisis terhadap kondisi konflik politik di Media Sosial*, Bandung: UIN Sunan Gunung Jati.

<sup>16</sup> Muhammad Fadli dkk, *Keterlibatan Elit Lokal dalam Peningkatan Partisipasi Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2015*, Jurnal Aristo Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2018.

Penelitian ini menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Majelis Dzikir Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang bernama Majelis Dzikir Nurussalam dan memiliki peran strategis di era reformasi. Majelis dzikir yang statusnya sebagai organisasi masyarakat ini menjadikan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep *Al-Ummah*, *Al-Ukhuwah Al-Islamiyah*, dan *At-Ta'awun* sebagai landasan dalam menafsirkan ayat sosial integratif yang selanjutnya dijadikan sebagai entitas dakwah. Dakwah sebagai komunikasi massa sejalan dengan komunikasi politik yang lebih cenderung dalam memanfaatkan komunikasi sebagai cara yang massif untuk menggalang massa. Bahkan kegiatan tersebut sudah mampu melaksanakan fungsi politik dakwah sebagai bagian dari sistem interest-group.<sup>17</sup>

Kedua belas, penelitian Andri Nirwana yang berjudul "Akulturasi Politik dalam Dunia Dakwah". Penelitian ini menjelaskan tentang dakwah dan politik yang bisa digabungkan menjadi satu kesatuan, yang mana kegiatan politik dimanfaatkan sebagai alat untuk menyampaikan dakwah kepada masyarakat. dakwah dalam operasionalnya bisa menggunakan berbagai media termasuk kekuasaan, tetapi kekuasaan bukan merupakan tujuan dari dakwah. Dakwah berkaitan erat dengan politik, tetapi ketika yang menguasai politik ialah mereka yang memusuhi islam, maka kebijakan

---

<sup>17</sup> Andi Rosa, *Politik Dakwah dan Dakwah Politik di Era Reformasi Indonesia*, Jurnal Walisongo, Vol. 22, No. 1, Tahun 2014.

yang disampaikan dapat menekan umat islam. Oleh karena itu, hubungan politik atau kekuasaan dengan dakwah akan membantu mempercepat tercapainya tujuan dakwah dan dakwah dapat berjalan tanpa *dibacking* oleh organisasi kuat atau perangkat negara, tetapi keberhasilannya sangat berbeda bila dibandingkan dengan hasil yang dicapai oleh dakwah yang dibantu oleh organisasi kuat atau perangkat Negara.<sup>18</sup>

Ketiga belas, penelitian Pahlevy yang berjudul “Dakwah dan Politik: Pemikiran dan Kiprah KH. Mahrus Amin”. Penelitian ini menjelaskan tentang konsep dakwah dan politik serta korelasi antara keduanya menurut KH. Mahrus Amin yang berupa dakwah yang hakikatnya menegakkan syari’at agama islam, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya sehingga dakwah harus dilakukan dengan mengikuti jejak Rosulullah. Sedangkan politik merupakan suatu yang berkenaan dengan pemerintahan dalam suatu Negara terutama dalam pembinaan bangsa dan umat sesuai ajaran islam. Korelasi antara keduanya ialah bahwa politik merupakan salah satu media dalam berdakwah yang apabila politik tersebut berhasil, maka akan dapat melaksanakan syari’at islam dan memperjuangkan umat.<sup>19</sup>

Keempat belas, buku yang ditulis oleh Abdur Razzaq yang berjudul “Dakwah dan Pemikiran Politik Islam: Kajian

---

<sup>18</sup> Andri Nirwana, *Akulturasi Politik dalam Dunia Dakwah*, Jurnal Substantia, Vol. 18, No. 2, Tahun 2016.

<sup>19</sup> Pahlevy, *Dakwah dan Politik: Pemikiran dan Kiprah KH. Mahrus Amin*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010.



Teoritis dan Empiris” yang berisi tentang konsep dakwah yang ditinjau dari segi pendidikan, politik dalam islam dan pentingnya jama’ah dalam berdakwah. Pada buku ini, politik dalam pandangan ulama klasik menurut Al-Qardhawiy memiliki dua makna. Makna umum dari politik adalah mengelola urusan manusia dan masalah kehidupan dunia manusia berdasarkan syari’at agama. Sedangkan makna khususnya ialah pendapat yang dinyatakan imam, hukum, dan ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan oleh imam yang bertujuan mencegah kerusakan yang akan terjadi, membasmi kerusakan yang terjadi atau memecahkan masalah khusus.<sup>20</sup>

Kelima Belas, jurnal penelitian Ahmad Zumaro yang berjudul “Politik Sebagai Instrumen Dakwah dalam Meminimalisir Kemungkaran”. Penelitian ini menjelaskan bahwa dakwah dalam merubah kemungkaran dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, akan tetapi cara yang paling efektif ialah dengan menggunakan politik atau kekuasaan. Karena dalam suatu Negara, kekuasaan yang dapat mengatur masyarakat adalah membuat undang-undang. Politik atau kekuasaan sebagai instrument dakwah selain mengikat setiap individu juga mudah disinergikan dengan tujuan dakwah.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Abdur Razzaq, *Dakwah dan Pemikiran Politik Islam: Kajian Teoritis dan Empiris*, Palembang: NoerFikri Offset, 2017.

<sup>21</sup> Ahmad Zumaro, *Politik Sebagai Instrumen Dakwah dalam Meminimalisir Kemungkaran*, Jurnal Dakwah dan Komunikasi Ath-Thariq, Vol. 2, No. 2, Tahun 2018.

Keenam belas, jurnal penelitian Rudi Santoso dan Fathul Mu'in yang berjudul "Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung menghadapi Era Disrupsi Informasi". Penelitian ini membahas langkah-langkah efektif yang dilakukan oleh MUI Lampung yang berhasil menjawab tantangan era disrupsi informasi melalui media yang dikembangkan seperti [www.mui-lampung.or.id](http://www.mui-lampung.or.id), bulletin Al-Ukhuwah, Channel Youtube MUI Lampung Online, Fans Page, Facebook dan Twitter MUI Lampung serta Instagram @muilampung\_online. Peran KH. Khairuddin Tahmid yang merupakan ketua umum MUI turut serta dalam mengisi konten-konten di media sosial MUI Lampung Online.<sup>22</sup>

Ketujuh belas, jurnal penelitian Robby Aditya Putra yang berjudul "Manajemen Konflik dalam Film My Name is Khan dalam Perspektif Konsep Dakwah". Penelitian ini membahas tentang konflik yang merupakan kebutuhan dalam kehidupan manusia, tetapi manajemen konflik juga dibutuhkan agar konflik tidak meluas dan membahayakan banyak pihak. Pada penelitian ini, peneliti akan mengkaji manajemen konflik ditinjau dari tiga konsep dakwah, yakni *Bil Hikmah*, *Mauidzah Hasanah* dan *Mujadalah*. Penelitian ini menghasilkan bahwa film My Name is Khan sebagai representasi untuk mengakhiri konflik yang melibatkan *Bil*

---

<sup>22</sup> Rudi Santoso dan Fathul Mu'in, *Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung menghadapi Era Disrupsi Informasi*, Jurnal Ath-Thariq, Vol. 04, No. 01, tahun 2020.

*Hikmah, Maudzah Hasanah dan Mujadalah*, tetapi film ini juga mengandung pluralis yang berlebihan.<sup>23</sup>

Kedelapan belas, penelitian Wildan Insan Fauzi yang berjudul “Hamka Sebagai Ketua Umum MUI (Majelis Ulama Indonesia) dalam Menghadapi Masalah Sosial Politik pada Masa Orde Baru 1975-1981”. Penelitian ini menjelaskan tentang MUI yang dibentuk pada zaman pemerintah orde baru yang diharapkan bisa mendukung kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh pemerintah orde baru. Hamka dalam hubungannya yang dimiliki dengan pemerintah orde baru akan turut membantu kepentingan pemerintah jika hal tersebut sejalan dengan kepentingan umat islam dan berusaha mengkritik kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan ajaran islam. MUI dalam perjalanannya berusaha untuk membangkitkan umat islam Indonesia dari keterpurukannya, dan MUI memilih jalan dakwah sosial kemasyarakatan untuk memecahkan permasalahan tersebut.<sup>24</sup>

Kesembilan Belas, penelitian Ika Yulistiana yang berjudul “Respon Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap Regulasi Bernuansa Agama”. Penelitian ini membahas tentang para tokoh MUI yang memahami regulasi bernuansa

---

<sup>23</sup> Robby Aditya Putra, *Manajemen Konflik dalam Film My Name is Khan dalam Perspektif Konsep Dakwah*, Jurnal Ath-Thariq, Vol. 01, No. 02, Tahun 2017.

<sup>24</sup> Wildan Insan Fauzi, *Hamka Sebagai Ketua Umum MUI dalam menghadapi Masalah Sosial Politik pada Masa Orde Baru 1975-1981*, Jurnal Factum, Vol. 06, No. 02, Tahun 2017.

agama sebagai sebuah istilah pada produk hukum daerah yang muatannya digali dari sumber-sumber hukum agama yang diyakini dan berkembang ditengah umat atau masyarakat. dan pandangan MUI terhadap regulasi bernuansa agama bahwa regulasi yang semacam itu harus tetap diterapkan ditengah masyarakat karena hal tersebut lebih banyak memberikan manfaat dari pada *madharat nya*.<sup>25</sup>

Kedua puluh, penelitian Mohamad Baihaqi yang berjudul “Legitimasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Kontestasi Islam Politik Mutakhir”. Penelitian ini menjelaskan bahwa sebagai pemegang otoritas kekuasaan menurun-mendaki, para ulama dalam MUI telah menggunakannya dalam politik praktis pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2019. Lewat otoritas kuasa menurun-mendaki tersebutlah MUI melakukan mobilisasi dan mengerahkan massa turun ke jalan dalam aksi temu alumni 212. Selain itu, MUI melakukan legitimasi kepada masyarakat untuk mendapatkan suara bagi para calon yang diukung oleh masing-masing pengurus MUI.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Ika Yulistiana, *Respon Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap regulasi bernuansa Agama*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019.

<sup>26</sup> Mohamad Baihaqi, *Legitimasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Kontestasi Islam Politik Mutakhir*, Jurnal Kajian Politik Islam Politea, Vol. 02, No. 02, Tahun 2019.

## F. Landasan Teori

### 1. Teori Komunikasi Politik

Komunikasi Politik menurut Maswadi Rauf adalah informasi yang berisi pesan politik yang disampaikan oleh para actor politik kepada orang lain. Kata “politik” berasal dari bahasa Yunani yakni *polis* yang berarti Negara dimana terdapat sekelompok individu yang dinamakan masyarakat, pemerintah yang bertugas untuk mengatur, melindungi dan menjaga kepentingan masyarakat, juga terdapat suatu wilayah yang didalamnya terdapat pemerintahan serta masyarakat.<sup>27</sup>

Politik adalah cara memperjuangkan kepentingan bersama melalui Negara, selain itu, politik juga merupakan sebuah seni untuk bisa merubah dan mentransformasi sebuah Negara demokrasi yang damai.<sup>28</sup> Harold Lasswell memiliki model komunikasi yang berbunyi *who says what in which channel to whom with what effect* merupakan model utama dalam komunikasi politik yang bersifat linier dan menjadi acuan banyak komunikasi politik yang juga memiliki unsur-unsur seperti komunikator politik, pesan politik, saluran atau media politik, sasaran atau target politik dan efek politik.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup>Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik*, Depok: Rajawali Press, 2017, hal. 3.

<sup>28</sup>*Ibid.*, hal. 3.

<sup>29</sup>Prof. Deddy Mulyana, *Komunikasi Politik, Politik Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013, hal. 5.

Komunikasi politik menurut Mc Nair ialah suatu hal yang menjelaskan tentang alokasi sumber daya publik yang memiliki nilai, baik itu nilai kekuasaan ataupun ekonomi, maka para petugas yang memiliki kewenangan akan memberikan kekuasaan dan keputusan yang berupa undang-undang baik itu secara legislatif maupun eksekutif, dan sanksi baik yang berupa hadiah ataupun denda.<sup>30</sup>

Lasswell memandang komunikasi politik terbagi menjadi dua: pertama, komunikasi politik selalu menyesuaikan pada nilai dan berusaha mencapai tujuan, kedua, komunikasi politik memiliki tujuan untuk menjangkau masa depan dan memiliki sifatantisipasi juga memiliki hubungan dengan masa lalu dan selalu memperhatikan kejadian-kejadian di masa lalu.<sup>31</sup>

Komunikasi Politik juga memiliki beberapa tujuan, seperti halnya untuk membentuk citra politik di masyarakat, menciptakan opini public yang baik di masyarakat, turut serta dalam pemilihan umum dan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat. terdapat beragam bentuk-bentuk komunikasi politik yang biasa digunakan oleh para politikus, diantaranya adalah:

---

<sup>30</sup> Hafied Changara, *Komunikasi Politik; Konsep, Teori dan Strategi*, Jakarta: Rajawali Press, 2009, hal. 36.

<sup>31</sup>SP. Varma, *Teori Politik Modern*, Depok: Raja Grafindo, 2016, hal. 258.

### **1. Retorika Politik**

Retorika berasal dari bahasa Yunani *rhetorica* yang memiliki arti seni dalam berbicara. Retorika awalnya digunakan dalam perdebatan yang sering terjadi di ruang persidangan untuk saling mempengaruhi.<sup>32</sup>

### **2. Agitasi Politik**

Agitasi politik menurut Harbert Blumer ialah kegiatan yang dilakukan untuk membangkitkan dan mengajak rakyat untuk mengikuti gerakan politik, baik secara lisan maupun tulisan yang dapat merangsang dan membangkitkan emosi masyarakat. Hal ini dimulai dengan melakukan kontradiksi di masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan menggerakkan masyarakat untuk melawan kenyataan hidup yang dialami selama ini yang bertujuan untuk meresahkan masyarakat.

### **3. Propaganda Politik**

Propaganda politik merupakan kegiatan paling lama dalam politik. Propaganda merupakan melakukan kebohongan kepada masyarakat dengan cara menyebarkan ideology fasisme untuk menyebarluaskan pengaruh dan kekuasaannya.

---

<sup>32</sup> Anwar Arifin, *Komunikasi politik Pradigma Teori Aplikasi-Aplikasi Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 2003, hal. 65.

#### 4. Kampanye Politik

Kampanye dalam kegiatan politik merupakan hal yang lebih menarik dari bentuk politik lainnya. Kampanye politik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mempromosikan dirinya guna memperoleh dukungan dari masyarakat. dalam kampanye politik sendiri terdapat beberapa macam kampanye, diantaranya adalah: (1) Menggunakan media massa guna mempromosikan diri dalam kegiatan politik seperti media cetak, media elektronik dan media sosial. (2) kampanye interpersonal yang merupakan mempromosikan diri sendiri yang lebih mengutamakan sikap dan kepribadian diri sendiri. (3) kampanye organisasi dengan cara mengerahkan banyak orang seperti tim sukses untuk mengerahkan anggotanya guna memilih calon pemimpin politik.

Komunikasi politik memiliki fungsi yang terbagi menjadi dua bagian, yakni: (1). Komunikasi politik yang memiliki fungsi berada pada struktur pemerintahan, fungsi ini disebut dengan istilah *the governmental political sphere*, berisi tentang pesan yang meliputi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Pesan komunikasi ini diajukan untuk pemerintah agar bisa mewujudkan rasa loyalitas dan integritas nasional sehingga bisa mencapai tujuan yang lebih luas. Komunikasi politik memiliki fungsi yang berada pada struktur masyarakat dan dikenal dengan istilah *the socio political sphere* yang



artinya agregasi dan artikulasi kepentingan yang mana keduanya merupakan komunikasi yang terjadi antar kelompok sosiasi dan proses penyampaian pesan komunikasi kepada pemerintah ialah dari hasil agregasi dan artikulasi tersebut.<sup>33</sup>

Unsur-unsur komunikasi politik tidak jauh berbeda dengan unsur komunikasi pada umumnya. Komunikasi politik ialah informasi yang berisi seputar politik dan terdapat hubungan atau keterkaitan dengan unsur-unsur komunikasi yang diakibatkan oleh politik tertentu. Unsur-unsur tersebut diantaranya adalah;<sup>34</sup>

**a. Komunikator**

Dalam komunikasi politik, Komunikator berperan sebagai pembentuk opini politik. Komunikator politik memiliki peran sosial utama, khususnya pada proses opini publik. Menurut Halloran, komunikator politik berada pada posisi utama dalam kegiatan komunikasi. Karena proses komunikasi yang akan dilakukan oleh komunikator ditentukan oleh situasi sosial tempat komunikasi berasal. Hal inilah yang menetapkan adanya keakraban antara komunikator dan komunikan, juga menjadikan hubungan diantara keduanya sebagai bagian integral dari sistem sosial yang ada. Dan Nimo mengatakan bahwa terdapat

---

<sup>33</sup>Sumarno AP, *Dimensi-dimensi Komunikasi Politik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989, hal. 28.

<sup>34</sup>Dan Nimmo, *Komunikasi Politik Komunikator Pesan Media*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993, hal. 8-9.

tiga kelompok yang berperan sebagai komunikator politik, diantaranya adalah; politikus, professional dan aktivis. *Politikus* berperan sebagai perwakilan dari kelompok dan dengan sendirinya pesan-pesan politik akan ditujukan untuk mencapai tujuan politik kelompok tersebut. *Komunikator professional* berfungsi sebagai manipulator dan makelar symbol yang menghubungkan pemimpin satu sama lain dengan anggota kelompok atau pengikutnya. Komunikator professional ini terdiri atas jurnalis dan promotor. Yang terakhir, *komunikator politik dari kalangan aktivis* terbagi menjadi dua, yakni: aktivis sebagai juru bicara bagi kepentingan yang terorganisasi, ialah mereka yang berbicara untuk kepentingan terorganisasi dan juga mewakili tuntutan kenaggotaan suatu organisasi dan melakukan tawar-menawar politik. Kedua, aktivis pemuka pendapat. Aktivis ini memiliki peran untuk mempengaruhi keputusan orang lain dengan meyakinkan khalayak untuk mengikuti pilihannya.

**b. Pesan**

Pesan dalam kegiatan komunikasi politik ialah pembicaraan atau penyampaian informasi sebagai proses negosiasi yang bertujuan untuk membentuk pengertian bersama antara beberapa pihak seperti komunikator dan komunikan politik. Pesan-pesan yang disampaikan oleh

komunikator adalah pesan yang berisi pernyataan sebagai panduan pemikiran dan perasaan, ide, informasi, keluhan, keyakinan, himbauan, anjuran dan lain sebagainya.

**c. Media**

Dan Nimmo menyebutkan terdapat tiga jenis media komunikasi yang digunakan dalam kegiatan komunikasi politik seperti: media massa, media komunikasi interpersonal dan media komunikasi organisasi. Dalam komunikasi massa, terdapat dua bentuk saluran, bentuk yang pertama terdiri atas komunikasi tatap muka seperti para kandidat yang berbicara didepan rapat umum, khalayak besar atau konferensi pers. Bentuk kedua terjadi jika ada perantara antara komunikator dan komunikan. Disinilah media, teknologi dan sarana komunikasi lainnya turut ikut serta.

Media komunikasi interpersonal merupakan bentuk hubungan satu kepada satu dan saluran ini dapat berbentuk tatap muka maupun perantara. Sedangkan media komunikasi organisasi yang dapat menghubungkan penyampaian pesan satu kepada satu dan satu kepada banyak. Tetapi komunikasi organisasi ini jarang dilakukan karena biasanya para pelaku politik melakukan penyebaran atau penyampaian informasi melalui perantara seperti penyebaran pamflet, spanduk dan banner, pembagian atribut seperti kaos, dan bisa juga pembagian sembako.

**d. Khalayak**

Pengertian khalayak menurut Jalaluddin Rahmat adalah sejumlah orang yang heterogen. Mereka akan menjadi khalayak komunikasi politik setelah mereka “mengkristal” menjadi opini publik. Arthur F Bentley dalam bukunya *The Process of Government* yang dikutip oleh Dan Nimo mengartikan khalayak sebagai bagian dari orang-orang dalam masyarakat yang diperlakukan tidak sebagai massa fisik yang berpisah dari massa yang lain, melainkan sebagai kegiatan massa yang tidak menghalangi orang-orang yang berpartisipasi dalam kegiatan kelompok lain.

**e. Efek**

Efek adalah dampak atau pengaruh dari pesan yang disampaikan oleh komunikator politik atau media. Dalam komunikasi pemilu, pilkada dan pilkades, efek yang diharapkan dari kegiatan komunikasi politik adalah pemberian suara kepada para kandidat politik yang diusungnya.

Keterlibatan Politik yang juga sering disebut partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dalam demokrasi dan keterlibatan politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Menurut Huntington dan Nelson, keterlibatan politik adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi

yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.<sup>35</sup>

Ramlan Subakti memberikan definisi terkait keterlibatan politik yang berarti bentuk keikutsertaan warga Negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi kehidupannya. Sedangkan Miriam Budiarmo menyatakan bahwa keterlibatan politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok manusia yang turut serta aktif dalam kegiatan politik yaitu dengan cara turut memilih pemimpin Negara maupun daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintahan atau anggota parlemen dan lain sebagainya.<sup>36</sup>

Keterlibatan Politik didasari oleh beberapa faktor. Menurut Ramlan Subakti, terdapat dua variabel penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi seseorang:

- a) Pertama, Aspek kesadaran politik terhadap pemerintah (sistem politik). Yang dimaksud dalam kesadaran politik

---

<sup>35</sup> Cholisin, dkk, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Yogyakarta: UNY Press, 2007, hal. 151.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hal. 150.

adalah kesadaran akan hak dan kewajiban warga Negara seperti hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial, dan lain sebagainya.

- b) Kedua, menyangkut bagaimana penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya.

Selain itu, terdapat juga faktor yang berdiri sendiri (bukan variabel independen) yang artinya bahwa rendah kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti status sosial, afiliasi politik orang tua, dan pengalaman organisasi. Yang dimaksud status sosial ialah kedudukan seseorang berdasarkan keturunan, pendidikan, pekerjaan, dan lainnya. Sedangkan yang dimaksud status ekonomi adalah kedudukan seseorang dalam lapisan masyarakat berdasarkan pemilik kekayaan. Seseorang yang mempunyai status sosial dan ekonomi tinggi diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik, akan tetapi memiliki minat serta perhatian pada politik dan kepercayaan terhadap pemerintah.<sup>37</sup>

Menurut Myron Weimer, keterlibatan politik dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti:<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, 2007, hal. 144-145.

<sup>38</sup> Mohtar Mas'ood dan Colin MacAndrew, *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: UGM Press, 2008, hal. 56-57.

**a) Modernisasi**

Modernisasi disegala bidang akan berimplikasi pada komensialisme pertanian, industrial, meningkatkan arus urbanisasi, peningkatan kemampuan baca tulis, perbaikan pendidikan dan pengembangan media massa atau media komunikasi secara luas.

**b) Terjadi Perubahan Struktur Kelas Sosial**

Terjadinya perubahan sosial struktur kelas baru itu sebagai akibat dari terbentuknya kelas menengah dan pekerja baru yang meluas era industrialisasi dan modernisasi.

**c) Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa modern**

Ide-ide baru seperti nasionalisme, liberalisme, membangkitkan tuntutan-tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan suara.

**d) Adanya konflik diantara para pemimpin politik**

Pemimpin politik yang bersaing memperebutkan kekuasaan sering kali untuk mencapai kemenangannya dilakukan dengan cara mencari dukungan massa.

**e) Keterlibatan pemerintah yang semakin luas dalam unsure ekonomi, sosial dan budaya**

Meluasnya ruang lingkup aktivis pemerintahan ini sering kali merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan organisasi untuk ikut serta dalam mempengaruhi pembuatan keputusan politik.

## 2. Teori Konflik Sosial

Schermerhorn menjelaskan bahwa konflik ialah ketidaksepakatan yang terjadi diantara individu mengenai masalah yang bersifat substantive atau emosional. Secara umum pengertian konflik adalah perbedaan, pertentangan ataupun permusuhan yang terjadi diantara individu dengan individu lainnya.<sup>39</sup>

Hockers dan Wilmot mengartikan konflik sebagai hasil ketergantungan komunikasi pada individu yang merasa tidak sesuai dengan individu lainnya seperti tujuan dan gangguan dalam upaya mencapai tujuan-tujuan tersebut. Sedangkan Gosselin mendefinisikan konflik sebagai suatu situasi yang ada diantara dua kubu atau lebih yang memiliki kepentingan dan persepsi yang berbeda. Dari pengertian konflik diatas dapat kita simpulkan bahwa konflik terjadi dikarenakan penyebab yang kompleks dan mungkin tidak bersifat hanya satu penyebab. Konflik bisa terjadi dikarenakan adanya komunikasi yang terjadi karena perbedaan kepentingan, nilai dan keyakinan juga pandangan dan tujuan.<sup>40</sup>

Konflik sering dipandang sebagai sesuatu kondisi yang menghambat peningkatan kinerja seseorang dalam organisasi.

---

<sup>39</sup>Syafaruddin Alwi, *Resolusi Konflik dan Negosiasi Bisnis*, Yogyakarta: BPF, 2013, hal. 7.

<sup>40</sup>Ibid., hal. 8.



Pada tingkat konflik tertentu sebenarnya jika diselesaikan dengan pendekatan dan metode serta pada waktu yang tepat, bisa menjadi faktor pendorong perubahan yang lebih bermakna bagi organisasi. Sebaliknya, jika konflik dikelola secara buruk, hal tersebut akan mendorong hubungan dalam organisasi menjadi buruk, moral kerja menurun dan kolaborasi dalam tim kerja menjadi lemah.<sup>41</sup>

Konflik sosial ialah bentuk interaksi sosial yang terjadi antara satu individu dengan individu lainnya yang dilengkapi dengan adanya ancaman, permusuhan, menekan hingga saling ingin menghancurkan pihak lainnya. Dalam bentuk konflik yang ekstrem, konflik tidak hanya sekedar untuk mempertahankan eksistensi, melainkan sampai tahap ingin membinasakan individu yang dianggap lawannya.

Secara garis besar, konflik dikelompokkan pada berbagai macam bentuk, diantaranya adalah:

**a. Berdasarkan sifatnya**

1) Konflik Destruktif

Konflik destruktif merupakan konflik yang muncul dikarenakan adanya perasaan membenci, tidak senang dan dendam kepada orang lain sehingga terjadi bentrokan antara satu individu dengan

---

<sup>41</sup>Ibid., hal. 8.

individu yang lain atau kelompok lain dan berakhir saling merenggut nyawa.

2) Konflik Konstruktif

Sedangkan konflik konstruktif ialah konflik yang terjadi diakibatkan adanya perbedaan dalam berpendapat baik dari satu kelompok maupun dengan kelompok lainnya dalam menyelesaikan permasalahan. Konflik ini akan menghasilkan konsensus dari berbagai pendapat antar kelompok sehingga menghasilkan sebuah perbaikan.<sup>42</sup>

**b. Berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik**

1) Konflik Vertikal

Konflik ini merupakan konflik yang terjadi di masyarakat yang terdapat dalam satu struktur yang memiliki hierarki seperti konflik yang terjadi antara atasan (bos) dan bawahan (pegawai) dalam sebuah perusahaan.

2) Konflik Horizontal

Konflik horizontal ialah konflik yang terjadi antara satu individu dengan individu lainnya atau antar kelompok dengan kelompok lainnya yang memiliki kedudukan yang sama, seperti konflik yang terjadi di organisasi massa.

---

<sup>42</sup> Dr. H. Lauer, *Perspektif tentang Perubahan Sosial*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001, hal. 98.

### 3) Konflik Diagonal

Sedangkan konflik diagonal ialah konflik yang terjadi diakibatkan adanya ketidakadilan alokasi sumber daya pada sebuah organisasi sehingga mengakibatkan konflik yang ekstrem, seperti konflik yang terjadi di Aceh.<sup>43</sup>

Sedangkan Soerjono Soekanto membagikan konflik pada lima bentuk, diantaranya adalah:<sup>44</sup>

#### 1) Konflik pertentangan pribadi

Merupakan konflik yang terjadi antara satu individu dengan individu lainnya dikarenakan adanya perbedaan pendapat.

#### 2) Konflik pertentangan rasial

Merupakan konflik yang terjadi diakibatkan adanya perbedaan ras, suku dan budaya.

#### 3) Konflik pertentangan antara kelas sosial

Ialah konflik yang terjadi diakibatkan adanya perbedaan kepentingan antara kelas-kelas sosial.

#### 4) Konflik pertentangan politik

Ialah konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang diakibatkan adanya perbedaan kepentingan atau tujuan seseorang dalam politik.

---

<sup>43</sup> Kusnadi, *Masalah Kerja Sama Konflik dan Kinerja*, Malang, Taroda, 2002, hal. 67.

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 1992, hal. 86.

5) Konflik pertentangan yang bersifat internasional.

Ialah konflik yang terjadi diakibatkan perbedaan kepentingan yang kemudian berpengaruh pada kedaulatan Negara.

Lewicky dan kawan-kawan mengidentifikasi level konflik yang memudahkan dalam memilih model yang tepat dalam resolusi konflik. Level konflik tersebut diantaranya adalah,<sup>45</sup>

- a. *Intrapersonal Conflict* adalah konflik yang terjadi pada diri individu dan disebabkan oleh beberapa faktor seperti ide, emosi, nilai-nilai dalam diri individu yang melekat dan bertentangan pada diri seseorang.
- b. *Interpersonal Conflict* adalah ketika sesuatu seperti ide, emosi dan nilai yang berbeda antara seseorang dengan orang lain, maka akan timbul konflik *interpersonal*. Konflik ini juga bisa disebut dengan konflik yang mengenai satu individu dengan individu lainnya.
- c. *Intragroup Conflict* ialah konflik yang mengenai individu dengan individu dan individu dengan kelompok (*intragroup conflict*) yang berpotensi hadir dari konflik interpersonal, sehingga banyak studi tentang negosiasi mengambil inspirasi dari konflik *interpersonal* yang melekat pada manajemen dan resolusi konflik.

---

<sup>45</sup>Ibid., hal. 9.

- d. *Intergroup Conflict* adalah konflik yang disebabkan oleh fakto-faktor yang semakin kompleks dikarenakan komunikasi yang mencakup banyak orang dan mencakup berbagai macam kepentingan seperti kepentingan individu, kepentingan kelompok dan kepentingan antar kelompok.

Dilihat dari tingkat konflik yang terjadi, sifat konflik dibedakan menjadi konflik yang bersifat fungsional (konstruktif) dan konflik yang bersifat disfungsional (destruktif). Konflik yang bersifat fungsional mendorong seseorang atau staff untuk selalu termotivasi mencapai prestasi kerja yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika konflik tersebut bersifat disfungsional, maka akan mengakibatkan gairah kerja menurun dan potensi prestasi individu menjadi menurun. Kedua sifat konflik tersebut berpotensi muncul dari berbagai karakteristik penyebab, seperti; ketergantungan prosesi kerja, ketidak seimbangan *power* dan perbedaan nilai, ketidakjelasan peran, dan kelangkaan sumber-sumber.<sup>46</sup>

### **3. Teori Komunikasi Dawah**

Dakwah menurut Wahyu Ilaihi adalah kegiatan yang dilakukan seperti memanggil atau mengajak individu untuk melaksanakan ajaran agama islam. Menurutnya, dakwah juga merupakan usaha dalam meningkatkan pemahaman agama agar berubahnya sikap dan perilaku manusia yang semulanya

---

<sup>46</sup>Ibid., hal. 9.

belum sesuai dengan tuntutan syariat menjadi sesuai dan bisa memperoleh kebahagiaan.<sup>47</sup>

Quraish Shihab mendefinisikan dakwah sebagai ajakan menuju kesadaran atau sebagai keinginan untuk memperbaiki diri sendiri dan orang lain kearah yang lebih baik. Adanya dakwah bukan hanya sekedar keinginan untuk meningkatkan pemahaman dalam hal perilaku dan pandangan hidup, tetapi dakwah juga harus memiliki lebih banyak peran untuk melaksanakan ajaran islam di berbagai tingkatan.<sup>48</sup> Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 125:

ادع الى سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتى  
هى أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضلّ عن سبيله وهو أعلم  
بالمهتدين.<sup>49</sup>

Artinya:

*Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.*

<sup>47</sup>Wahyu Ilahi, *Manajemen Dakwah*, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 21.

<sup>48</sup>Samsul Munir Amin, *Sejarah Dakwah*, Jakarta: Amzah, 2015, hal. 3

<sup>49</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*, Kudus: Menara Kudus, 2006, hal. 281.

## 1. Unsur-Unsur Dakwah

Dalam kegiatan berdakwah, terdapat beberapa unsure dakwah yang harus diperhatikan oleh pelaku dakwah disetiap kegiatan dakwah, diantaranya adalah:<sup>50</sup>

### a. Pelaku Dakwah (Da'i)

Kata *Da'i* secara umum sering disebut dengan "*muballigh*" (orang yang menyebarkan ajaran agama islam), namun sebutan ini artinya masih sangat sempit. Nasaruddin Lathief mendefinisikan bahwa da'i ialah seorang muslim dan muslimat yang menjadikan dakwah sebagai suatu pekerjaan pokok bagi ulama. Ahli dakwah adalah da'i, sedangkan muballigh adalah *mustama'in* (juru penerang) yang menyeru, mengajak dan memberi pengajaran dan pelajaran agama islam kepada orang lain.

### b. Penerima Dakwah (Mad'u)

Wahyu Ilahi mengartikan mad'u sebagai manusia yang menerima dakwah dari seorang da'i baik mad'u yang berkelompok maupun individu, mereka yang beragama islam maupun agama yang berbeda. Seorang da'i tidak boleh memilih mad'u mereka karena dakwah memiliki tujuan untuk mengajak orang lain agar mengikuti, mendengarkan nasihat dan memasuki agama islam.

### c. Materi Dakwah (Maddah)

---

<sup>50</sup>Wahyu Ilahi, Loc. Cit., hal 21.

Materi dakwah adalah isi pesan atau materi yang disampaikan oleh da'I kepada mad'u. Secara umum, materi dakwah dapat diklasifikasikan menjadi empat masalah pokok, diantaranya adalah; masalah akidah (keimanan), masalah syariah, masalah muamalah dan masalah akhlak.<sup>51</sup>

d. Media Dakwah

Media dakwah ialah alat yang digunakan para pelaku dakwah untuk memberikan materi dakwah kepada khalayak. Abdul Kadir Munsyi memberikan penjelasan bahwa media dakwah ialah alat yang menjadi penghubung antara ide dengan umat yang bisa tersampaikan dengan baik kepada khalayak.<sup>52</sup>

e. Metode (Cara-cara) Dakwah

Menurut M. Munir, metode dakwah adalah cara-cara tertentu yang dilakukan oleh seorang da'I kepada mad'u untuk mencapai suatu tujuan atas dasar hikmah dan kasih sayang. Hal yang sangat erat kaitannya dengan wasilah adalah *thariqah* (metode dakwah). Wasilah adalah alat-alat yang digunakan untuk menyampaikan ajaran islam, maka *thariqah* atau metode dakwah adalah jalan atau cara yang dipakai da'I untuk menyampaikan ajaran islam.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup>Wahyu Ilaihi, Op. Cit., hal. 24.

<sup>52</sup>Moh. Ali Aziz, Op. Cit., hal. 120.

<sup>53</sup>M. Munir, *Metode Dakwah*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 7.



f. Efek Dakwah

Kegiatan dakwah yang disampaikan oleh da'I kepada mad'u pasti akan menimbulkan reaksi. Efek dakwah merupakan umpan balik yang terjadi antara pelaku dakwah dan khalayak dikarenakan pesan dakwah yang disampaikan oleh seorang pelaku dakwah.<sup>54</sup> Jalaluddin Rahmat menyatakan bahwa terdapat tiga efek dalam dakwah, yakni efek kognitif, efek afektif dan behavioral.<sup>55</sup>

## 2. Metode Dakwah

Abdul Pirol mengartikan metode sebagai suatu cara yang akan dipilih dengan teliti untuk mencapai dan menyelesaikan suatu tujuan, rencana sistem, dan tata pikir manusia.<sup>56</sup> Bahiy Al-Khulli mendefinisikan metode dakwah adalah memindahkan manusia dari satu kondisi menuju kondisi yang lebih baik dari sebelumnya dengan cara dan rencana yang baik. Sedangkan Syekh Ali Mahfudz mengartikan metode dakwah sebagai usaha untuk mengarahkan manusia berbuat kebaikan dan memberi petunjuk, mengarahkan untuk melakukan hal yang baik dan menghindari kemunkaran agar mendapat kebahagiaan.<sup>57</sup>

---

<sup>54</sup>Wahyu Ilaihi, Op. Cit., hal. 34.

<sup>55</sup>Wahyu Ilaihi, Op. Cit., hal. 35.

<sup>56</sup>Abdul Pirol, *Komunikasi dan Dakwah Islam*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hal. 28.

<sup>57</sup>Ibid., hal. 30.

Al-Qur'an surat An-Nahl (16) : 125 menyebutkan beberapa metode dakwah, diantaranya adalah:<sup>58</sup>

a. *Hikmah.*

Secara etimologi, kata hikmah merujuk pada pengertian seperti keadilan, ilmu, kearifan, kenabian dan juga Al-Qur'an. Hikmah dapat diartikan sebagai kombinasi antara perkataan dan perilaku, pengetahuan dan amal sholeh, rendah hati dan sikap teliti dalam agama, ilmu serta pengalamannya. Kata hikmah juga sering diartikan sebagai suatu pendekatan yang beraneka ragam sehingga khalayak bisa memilih dan melaksanakan apa yang disampaikan oleh da'I atas keinginan mereka sendiri, tidak ada paksaan ataupun tekanan yang dirasakan oleh khalayak.<sup>59</sup>

*Dakwah bil Hikmah* merupakan cara komunikasi dakwah yang bersifat persuasif dan berorientasi pada manusia.<sup>60</sup> Al-Qahtan mengatakan, ada tiga faktor yang menjadi pondasi dakwah dengan cara hikmah, diantaranya adalah; ilmu, kesatuan dan kedewasaan berfikir. Ilmu memiliki artian memahami tentang dasar-dasar syari'at, keimanan dan bisa menguasai ilmu-ilmu inovasi yang dapat memperkuat keyakinan khalayak. Kesatuan memiliki definisi suatu pendekatan yang dilakukan oleh da'I dengan bersikap netral diantara dua titik ekstrim seperti emosional

---

<sup>58</sup>Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 136.

<sup>59</sup>Abdul Pirol, *Op. Cit.*, hal. 33.

<sup>60</sup>Abdul Pirol., *Op. Cit.*, hal. 35.

dan kepribadian yang memiliki arti da'I harus bisa menguasai emosi mereka dihadapan para mad'u sehingga para da'I tidak akan kehilangan kemampuan mereka untuk menilai sesuatu tanpa dasar rasional. Kedewasaan berfikir berarti menginginkan adanya pendekatan yang sempurna oleh da'I ketika menyampaikan dakwah dan tidak tergesa-gesa.<sup>61</sup>

b. *Mauizah Hasanah*.

*Mauizah Hasanah* memiliki artian nasihat baik yang diberikan seseorang kepada orang lain dengan cara yang baik, seperti pesan kebaikan yang disampaikan dengan bahasa yang santun, dapat diterima dengan baik oleh khalayak, sehingga khalayak atas kesadaran dan kerelaannya sendiri tanpa ada paksaan akan dapat menerima pelajaran yang disampaikan oleh da'i. Menurut Ali Musthafa Ya'kub, *mauizah hasanah* ialah perkataan yang berisi nasihat baik, ucapan baik yang bermanfaat bagi orang yang mendengarkan dan memberi kepuasan sehingga khalayak dapat meyakini apa yang disampaikan oleh para pelaku dakwah atau da'i.<sup>62</sup>

Menurut Al-Qahtany, da'i yang menghendaki dakwah dengan *mauizah hasanah* harus memperhatikan lima hal, diantaranya adalah:<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup>Abdul Pirol, Op. Cit., hal.36.

<sup>62</sup>Abdul Pirol, Op. Cit., hal. 44.

<sup>63</sup>Abdul Pirol, Op. Cit., hal. 45.

- Memperhatikan secara serius kemungkaran yang terjadi di masyarakat.
  - Mengutamakan kemungkaran yang lebih berbahaya di masyarakat dan ditangani sesuai dengan tingkat kerusakannya.
  - Memikirkan kemungkinan efek yang akan ditimbulkan dari kemungkaran.
  - Memunculkan argumentasi atau dalil-dalil yang berhubungan dengan efek dari kemungkaran, bila melalui ayat Al-Qur'an, hadist, perkataan sahabat dan nasihat ulama.
  - Nasihat yang disampaikan dapat didokumentasikan dalam bentuk tulisan agar bisa memotivasi mereka untuk bertaubat.
- c. *Mujadalah*.

Mujadalah merupakan diskusi yang dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai. *Mujadalah* ialah cara paling akhir dalam dakwah yang dapat dilakukan dengan mereka yang memiliki cara berfikir yang maju dan berwawasan luas.<sup>64</sup>

Dari berbagai macam obyek dakwah, metode diskusi (*mujadalah*) difokuskan pada obyek yang memiliki ilmu. Berdiskusi dengan cara semacam ini membutuhkan pemikiran yang tinggi dan keilmuan yang luas dan matang.

---

<sup>64</sup>Abdul Pirol, Op. Cit., hal. 48.

Karena Al-Qur'an memberikan perintah kepada manusia dengan istilah *al-ihsan* (dengan cara yang terbaik). Diskusi disampaikan dengan cara yang baik menandakan diskusi memiliki tiga bentuk; ada yang baik, yang terbaik dan juga buruk.<sup>65</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode *mujadalah* adalah metode dakwah dengan jalan berdiskusi atau berdebat tetapi dilakukan dengan cara yang terbaik. Kriterianya menghindari sikap emosional dan merendahkan martabat mitra diskusi dengan mengedepankan argumentasi-argumentasi yang tak dapat dibantah kebenarannya.<sup>66</sup>

### 3. Strategi Dakwah

Rogers mendefinisikan strategi komunikasi sebagai suatu rancangan yang dibuat untuk mengubah tingkah laku manusia dalam skala yang lebih besar dengan cara transfer ide-ide baru. Middleton selaku pakar perencanaan komunikasi juga mendefinisikan strategi komunikasi sebagai kombinasi yang terbaik dari semua elemen komunikasi dimulai dari komunikator, pesan, media, penerima pesan sampai pada pengaruh yang dirancang untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal.

Strategi dakwah ialah metode siasat atau taktik yang digunakan oleh para pelaku dakwah dalam kegiatan

---

<sup>65</sup>Abdul Pirol, Op. Cit., hal. 51.

<sup>66</sup>Abdul Pirol, Op. Cit., hal. 55.

dakwah. Fungsi strategi dakwah diantaranya adalah menyebarkan pesan dakwah yang bersifat informatif, persuasif dan instruktif kepada khalayak, dakwah yang dilakukan dengan cara langsung atau tatap muka juga kegiatan dakwah yang dilakukan melalui media.<sup>67</sup> Seperti halnya dakwah politik yang dilakukan oleh Nabi Musa dan Harun dalam menghadapi Fir'aun yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Taha ayat 43 dan 44:

أذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر  
أو يخشى<sup>68</sup>

Artinya

*Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya ia telah melampaui batas.*

*Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut.*

Ayat tersebut ketika di kontekstualisasikan dengan penelitian tentang komunikasi politik MUI sangatlah sesuai . karena pada hakikatnya seorang da'i selain memiliki tugas untuk mensyiarkan agama islam kepada

---

<sup>67</sup>AsmuniSyukir, *Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1983, hal. 51.

<sup>68</sup> Departemen Agama, Op. Cit., hal. 314.

masyarakat luas, mereka juga berfungsi sebagai penengan, penetralisir masyarakat yang sedang mengalami permasalahan, baik dalam ruang lingkup keluarga, dalam ruang lingkup keagamaan, sosial maupun dalam ruang lingkup politik.

Pada penelitian ini, strategi dakwah digunakan untuk meredam, meminimalisir dan menyelesaikan konflik yang dilakukan oleh tokoh MUI terhadap masyarakat Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Hafied Cangara dalam bukunya yang berjudul “Perencanaan dan Strategi Komunikasi” menjelaskan bahwa konflik pada dasarnya dapat diatasi dan diselesaikan sehingga membutuhkan seorang perencana komunikasi yang memiliki strategi diantaranya:<sup>69</sup>

- a. Melakukan riset untuk mengetahui akar masalah
- b. Membuat diagnosis untuk memecahkan masalah
- c. Menetapkan tujuan dan target sasaran.
- d. Bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat yang terkait dalam kegiatan tersebut.
- e. Berinisiatif untuk melakukan pendekatan, mengajukan saran dan mengorganisasi pertemuan informal dengan kelompok yang bertikai.

---

<sup>69</sup>Hafied Cangara, *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hal. 201.

- f. Membuat forum-forum komunikasi baik melalui jalur formal maupun informal dengan berbasis kearifan lokal.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan penemuan dengan cara analisis dan bersifat deskriptif.<sup>70</sup> Dalam penelitian ini, peneliti dapat mengetahui bagaimana keterlibatan tokoh MUI dalam pilkades, bagaimana komunikasi politik dan komunikasi dakwah yang dilakukan tokoh MUI dalam meminimalisir konflik pilkades serta bagaimana strategi dakwah yang digunakan oleh tokoh MUI ketika menyelesaikan atau meminimalisir konflik yang terjadi di masyarakat.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus menunjukkan pada sebuah fenomena yang diteliti secara mendalam. Fenomena tersebut bisa berupa sebuah kejadian, individu, organisasi, lembaga dan lain sebagainya.<sup>71</sup> Dalam studi ini pengumpulan datanya diperoleh

---

<sup>70</sup>M. Djunaidi Ghony, et all., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014,hal. 25.

<sup>71</sup>A. ChaedarAlwasilah, *Pokoknya Studi Kasus Pendekatan Kualitatif*, Bandung: Dunia Pustaka Jaya, 2018, hal. 75.



melalui beberapa cara seperti wawancara, observasi pelibatan dan dokumentasi.<sup>72</sup>

Konsep utama dari studi kasus ialah untuk mempelajari dan menginterpretasi suatu kasus tanpa intervensi pihak luar. Studi kasus juga menyoroti suatu keputusan seperti mengapa keputusan tersebut diambil oleh tokoh MUI, bagaimana keputusan tersebut diterapkan dan hasil apa yang ditunjukkan dari keputusan tersebut.<sup>73</sup>

### 3. Sumber Data Penelitian

Peneliti memiliki dua sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

#### a. Sumber Data Primer

Menurut Lofland, Sumber data primer yang ada dalam pendekatan kualitatif adalah kata-kata dan tindakan.<sup>74</sup>

Peneliti akan menggunakan transkrip hasil wawancara mendalam dan observasi langsung di lapangan sebagai hasil temuan data. Klasifikasi informan yang akan dipilih untuk menjadi informan adalah:

- Merupakan anggota MUI desa secara resmi.

---

<sup>72</sup>Prof. Dr. Hj. Mudjia Raharjo, *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017, Hal 17.

<sup>73</sup>Radix Prima Dewi dan Siti Nur Hidayah, *Studi Kasus Metode Penelitian Kualitatif*, Sorong: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong, 2019, hal.3.

<sup>74</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: Remaja Rosadarkaya, 2014, hal. 157.

Karena anggota MUI merupakan orang-orang pilihan yang dipilih dan dilantik secara langsung oleh pihak MUI kabupaten sehingga memiliki nilai lebih diantara para tokoh agama lainnya.

- Turut terlibat dalam kegiatan politik pilkades.  
Hal ini ditentukan atas dasar tokoh MUI benar-benar turut serta dalam politik pilkades guna menemukan keterlibatan para MUI dalam politik pilkades.
- Memiliki gelar pendidikan minimal strata 1 (S1)  
Batasan usia ditetapkan untuk memudahkan komunikasi antara peneliti dan narasumber juga menghindari terpaan jawaban dan keraguan dari narasumber.
- Maksimal berusia 50 tahun.  
Batasan usia ditetapkan untuk menghindari terpaan jawaban dari narasumber yang berbeda dengan pemahaman yang berbeda, untuk meminimalisir munculnya keraguan dalam jawaban yang diberikan oleh narasumber.

Berdasarkan klasifikasi diatas, maka terdapat delapan narasumber yang sesuai dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

**Tabel 1.1****Daftar Nama Narasumber Penelitian**

No	Nama	Jabatan
1	Otong Matsyhari, S. Ag.	Wakil Ketua
2	Asep Ali Murdana, S. Th. I	Sekretaris
3	Atin S. Ag	Anggota
4	H. Mardi Supriyadi, S. Pd	Anggota
5	Noval Ad Daruri, S. Ag	Anggota
6	H. Thohirin Dharma, S. Pd. I	Anggota
7	H. Halim, S. Ag	Anggota
8	Afifuddin, S. Pd	Anggota

**b. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang didapat dengan kajian pustaka yang memiliki fungsi sebagai pendukung dan pelengkap informasi. Data sekunder tersebut berupa buku, *literature*, jurnal ilmiah, artikel online, laporan penelitian maupun dokumen yang memiliki kaitan dengan objek penelitian.

**4. Metode Pengumpulan Data**

Menurut Creswell, metode pengumpulan data untuk penelitian studi kasus sangatlah luas dan menarik seperti pengamatan secara langsung (observasi),

wawancara secara mendalam, dokumentasi, catatan arsip, artefak fisik dan materi audio visual. Dalam penelitian ini disebutkan juga bahwa peneliti harus memiliki waktu luang untuk berinteraksi secara langsung dan lebih mendalam dengan orang yang diteliti. Sedangkan hasil laporan atau temuan data dilapangan harus mencakup jawaban yang hubungannya terkait dengan teori. Teknik pengumpulan data diantaranya adalah:<sup>75</sup>

- a. Wawancara merupakan proses untuk mendapatkan informasi dari lawan bicara (informan) secara langsung antara peneliti dan informan. Peneliti ini akan melakukan wawancara secara terstruktur, yakni dengan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelum melakukan kegiatan wawancara dengan narasumber.

Wawancara dilakukan kepada delapan dari tiga belas anggota MUI dengan beberapa kriteria khusus yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, delapan anggota MUI yang menjadi narasumber penelitian adalah:

- Bapak Otong Matsyahri, S. Pd
- Bapak Asep Ali Murdana, S. Th. I
- Bapak Atin, S. Ag
- Bapak Thohirin Dharma, S. Pd. I

---

<sup>75</sup>Ibid., hal. 186.

- Bapak Afifuddin S. Pd
- Bapak Abdul Halim S. Ag
- Bapak Naufal Ad-Daruri, S. Ag
- Bapak Mardi, S. Pd

b. Observasi

Observasi merupakan cara-cara yang digunakan untuk menganalisis kegiatan atau gerak gerik narasumber dengan memahami dan mengamati narasumber secara langsung.<sup>76</sup> Observasi yang digunakan adalah observasi partisipan yang melibatkan peneliti secara langsung untuk pengamatan pada kegiatan-kegiatan yang terjadi di lapangan.

Observasi langsung dilapangan dilakukan guna mencari tahu secara dalam hal-hal yang terkait dengan kegiatan pilkades dari awal pencalonan, kampanye, pemilihan kepala desa hingga penentuan hasil akhir pemilihan calon kepala desa. Selain itu, observasi lapangan juga dilakukan guna mengetahui keterlibatan para tokoh MUI pada kubu-kubu calon kepala desa, konflik-konflik yang terjadi di masyarakat desa Bojong Kulur dan penyelesaian yang dilakukan oleh para tokoh terkait, khususnya para tokoh MUI.

---

<sup>76</sup>Sujarwo dan Basrowi, *Manajemen Penelitian Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 2009, 161.

c. Dokumentasi

Dokumentasi pada penelitian ini digunakan sebagai data pelengkap yang didapatkan di lapangan seperti dokumen tentang kegiatan, gambar yang didapat secara langsung di lapangan, dan arsip-arsip penting yang akan menyebabkan data tersebut valid dan tidak diragukan kebenarannya.

Dokumentasi dalam penelitian ini dibutuhkan sebagai penguat data-data penelitian yang didapatkan melalui wawancara dan observasi. Dokumentasi yang didapatkan peneliti saat terjun kelapangan berupa dokumentasi kegiatan kampanye para tokoh MUI, dokumentasi konflik-konflik yang terjadi di Bojong Kulur, dan dokumentasi kegiatan dakwah yang dilakukan oleh para tokoh MUI dalam meminimalisir konflik di desa Bojong Kulur.

**5. Metode Pengolahan Data**

Setelah temuan data ditemukan secara keseluruhan, peneliti akan melakukan pengolahan data dengan cara melakukan pengecekan kebenaran dari data, menyusun data, melakukan penyandian atau *coding*, mengklarifikasi data dan mengoreksi jawaban dari narasumber yang belum jelas.

## 6. Metode Analisis Data

### a. Reduksi data

Reduksi data ialah proses penyaringan, perhatian yang dipusatkan pada penyederhanaan, dan perubahan data kasar yang didapat dari hasil temuan dilapangan. Langkah yang harus dilakukan pada bagian ini adalah dengan cara menajamkan analisis, mengelompokkan data temuan, membuang informasi yang tidak penting dan mengorganisasi temuan data sehingga dapat ditarik dan di verifikasi.<sup>77</sup>

### b. Penyajian data

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya ialah penyajian data. Penyajian data sendiri ialah informasi yang telah disusun oleh peneliti yang memiliki kemungkinan untuk diambil kesimpulan dan tindakan lanjut. Proses ini penting agar data bisa terorganisasi dan tersusun juga akan lebih mudah untuk dipahami.<sup>78</sup>

### c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan ialah tahap terakhir dari proses analisis data. Tahap ini adalah pengambilan kesimpulan dari data temuan yang sudah diperoleh

---

<sup>77</sup>Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Yogyakarta: UI Press, 1992, hal. 16.

<sup>78</sup>Ibid., hal. 17

dan telah melakukan tahap reduksi serta penyajian sebagai hasil dari penelitian.

## **7. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

Bab I berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan dan kerangka berfikir.

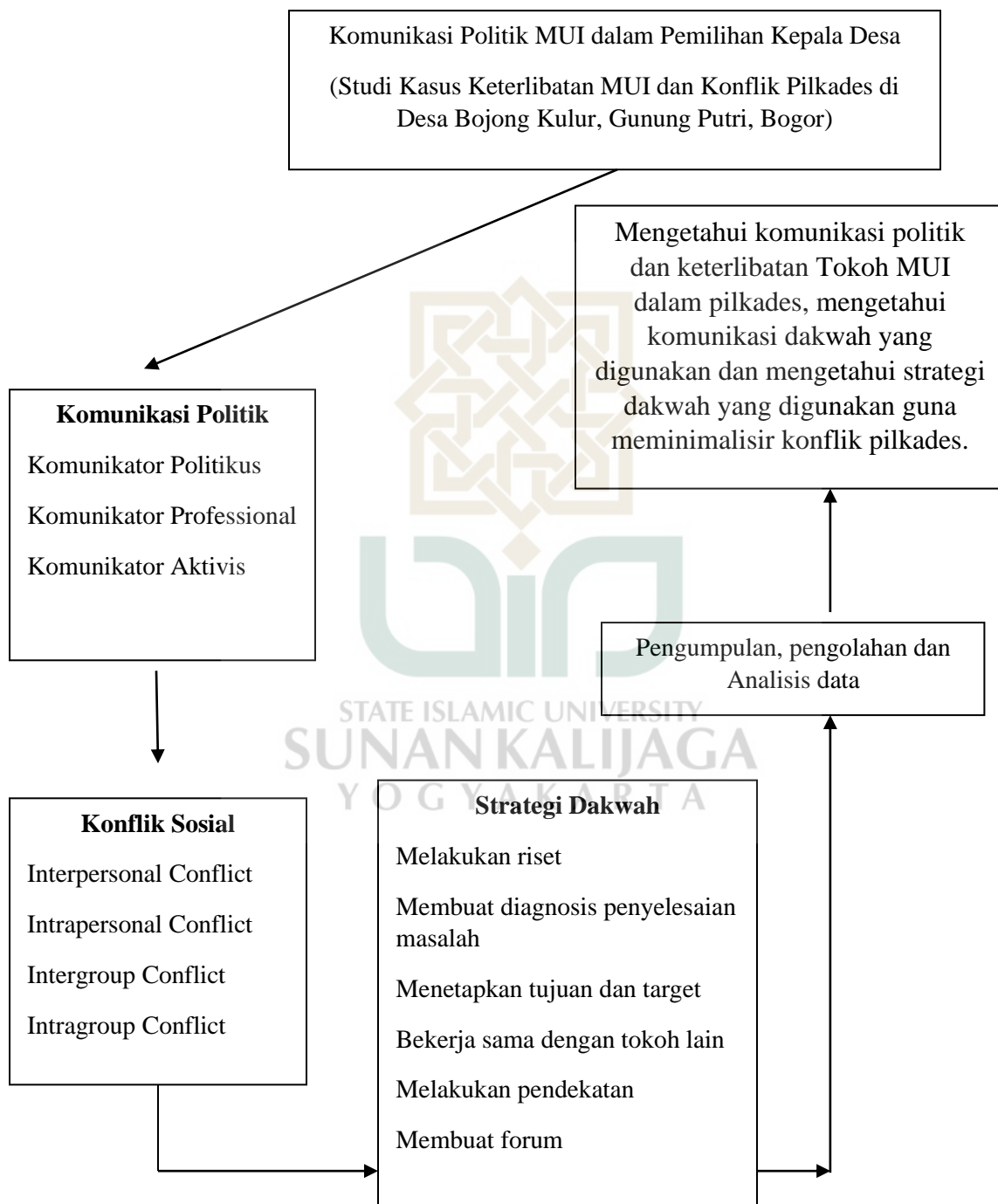
Bab II berisi tentang gambaran umum tokoh MUI Desa Bojong Kulur dan situasi politik pilkades di Bojong Kulur.

Bab III berisi tentang hasil penelitian yang berupa keterlibatan tokoh MUI dalam pemilihan kepala desa di Desa Bojong Kulur.

Bab IV berisi tentang penutup berupa kesimpulan penelitian dan saran. Kesimpulan memuat jawaban dari permasalahan yang sudah dilakukan dan saran memuat hal-hal yang disarankan untuk diteliti lebih lanjut yang didasari dengan hasil temuan penelitian.



### Kerangka Berfikir



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Keterlibatan Tokoh MUI dalam Politik Pilkades**

Keterlibatan para tokoh MUI dalam kegiatan politik pilkades menempati dua posisi, yakni politikus dan aktivis pemuka pendapat. Tokoh MUI politikus ialah mereka yang menjadi tangan kanan atau kepercayaan para calon kepala desa, selain itu mereka juga berperan untuk memberikan nasihat dan saran kepada para calon dan para pendukung, sedangkan tokoh MUI sebagai aktivis pendapat merupakan mereka yang memiliki peran untuk mempengaruhi keputusan orang lain dengan cara meyakinkan banyak masyarakat akan calon pilihannya.

##### **2. Komunikasi Politik MUI**

Komunikasi politik yang dilakukan oleh para tokoh MUI di desa Bojong Kulur menempatkan mereka sebagai seorang komunikator politik, bukan sebagai pelaku politik yang mencalonkan diri sebagai calon kepala desa pada ajang pilkades 2020. Pada kegiatan ini, mereka memiliki peran sebagai seorang yang mendukung para calon dengan fungsi yang berbeda sesuai dengan yang dibutuhkan para calon kepala desa sehingga membuat para tokoh tersebut turut terlibat secara langsung pada kegiatan politik pilkades.

##### **3. Konflik Pilkades**

Banyaknya konflik yang terjadi saat kegiatan pilkades dimulai dari pencalonan, pendaftaran, kampanye hingga pemilihan calon kepala desa menyebabkan para tokoh MUI memiliki peran

penting lainnya, yakni sebagai tokoh yang turut serta dalam menyelesaikan atau meminimalisir konflik yang terjadi di masyarakat. konflik yang terjadi di desa tersebut merupakan konflik antar individu dan konflik antar kelompok disebabkan adanya perbedaan pilihan calon kepala desa sehingga masyarakat terpecah.

Adanya konflik tersebut menyebabkan para tokoh MUI melakukan penyelesaian konflik dengan melakukan komunikasi dakwah kepada jama'ahnya, hal ini dikarenakan masyarakat yang memiliki ketergantungan pada tokoh agama dan para tokoh agama yang bergerak di jalan dakwah sehingga banyak dari mereka yang melakukan penyelesaian konflik dengan jalur dakwah.

#### **4. Komunikasi Dakwah MUI**

Komunikasi dakwah yang dilakukan para tokoh MUI ialah dengan cara memberikan pengetahuan kepada masyarakat seputar politik yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, selain itu juga memberikan nasihat-nasihat agar tidak terlalu berlebihan dalam berpolitik. Hal tersebut mayoritas dilakukan oleh para tokoh di pengajian baik di majelis taklim, musholla ataupun masjid. Menurut mereka, pada saat pengajian merupakan waktu yang tepat untuk melakukan penyelesaian konflik karena banyak masyarakat yang berkumpul saat pengajian membuat mereka lebih leluasa untuk memberikan nasihat dan pengetahuan secara langsung.

Selain melewati pengajian, banyak pula para tokoh MUI yang melakukan komunikasi dakwah guna menyelesaikan konflik dengan beberapa strategi dakwah lainnya, seperti halnya berdiskusi dan membuat forum guna membahas dan menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat. Diskusi tersebut dilakukan dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya juga kepada masyarakat yang berkonflik secara langsung dengan harapan konflik bisa diselesaikan dengan baik dan tidak menimbulkan konflik yang lebih besar.

#### **5. Strategi Dakwah MUI dalam Meminimalisir Konflik**

Strategi dakwah yang dilakukan oleh para tokoh MUI dalam menyelesaikan konflik pilkades diantaranya ialah:

- a. Mencari fakta secara langsung dilapangan yang menyebabkan terjadinya konflik.
- b. Mendiagnosis cara untuk menyelesaikan konflik yang terjadi.
- c. Memiliki tujuan dan sasaran yang tepat untuk menyelesaikan konflik.
- d. Bekerja sama dengan tokoh lainnya untuk menyelesaikan konflik.
- e. Melakukan pendekatan kepada masyarakat baik dengan cara diskusi ataupun secara langsung kepada masyarakat.
- f. Membuat forum-forum diskusi untuk membahas konflik dan cara menyelesaikannya.

Strategi dakwah yang dilakukan oleh para tokoh MUI memiliki pengaruh kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang berkonflik. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya mereka yang tetap berkumpul bersama baik di dalam pengajian maupun

tempat lainnya meskipun mereka memiliki pilihan calon yang berbeda. Selain itu, konflik yang terjadi tidak terlalu besar sampai menyebabkan kekerasan, hal ini dikarenakan antisipasi dan himbauan yang terus dilakukan oleh para tokoh MUI kepada masyarakat sehingga mereka pun cukup patuh kepada para tokoh.

## **B. Saran**

Saran untuk para pelaku dakwah khususnya para tokoh MUI agar bisa saling membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat meskipun mereka memiliki pilihan politik yang berbeda. Karena, selain sebagai tokoh MUI yang memiliki hak untuk terlibat dalam kegiatan pilkades, mereka juga sebagai tokoh MUI yang memiliki fungsi lain selain sebagai pendakwah, yakni penetralisir bagi masyarakat yang sedang bermasalah.

Saran untuk bagi peneliti selanjutnya, semoga penelitian ini bisa membantu menambah wawasan, menjadi tolak ukur dan bisa dikoreksi sehingga bisa menjadi penelitian yang lebih baik daripada sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aliyuddin, Enjang AS. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Dakwah Pendekatan Filosofis dan Praktis*. Widya Padjajaran, Bandung.
- Ali, Baharuddin. 2014. *Tugas dan Fungsi Dakwah dalam Pemikiran Sayyid Quthub*. *Dakwah Tabligh*, 15 (1), 128.
- Alwi, Syafaruddin. 2013. *Resolusi Konflik dan Negosiasi Bisnis*. BPFE, Yogyakarta.
- Amin, Samsul Munir. 2015. *Sejarah Dakwah*. Amzah, Jakarta.
- Antara dan JuliHantoro. 2020. *Pemkab Bogor tetap Gelar Pilkades Serentak 2020* <https://metro.tempo.co/read/1376284/pemkab-bogor-tetap-gelar-pilkades-serentak-2020> (diakses 27 November 2020).
- AP, Sumarno. 1989. *Dimensi-dimensi Komunikasi Politik*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arifin, Anwar. 2003. *Komunikasi Politik Paradigma Teori, Aplikasi-aplikasi, Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Aziz, Moh. Ali. 2006. *Ilmu Dakwah*. Kencana, Jakarta.
- Alwasilah A Chaedar, 2018. *Pokoknya Studi Kasus Pendekatan Kualitatif*. Dunia Pustaka Jaya, Bandung.
- Cangara, Hafied, 2014. *Perencanaan dan Strategi Komunikasi*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Cangara, Hafied, 2009. *Komunikasi Politik, Konsep, Teori dan Strategi*. Rajawali Press, Jakarta.
- Cholisin, dkk. 2007. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. UNY Press, Yogyakarta.
- Dermawan, Andy. 2002. *Metodologi Ilmu Dakwah*. Lesfi, Yogyakarta.
- Departemen Agama. 2006. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemah Bahasa Indonesia*. Menara Kudus, Kudus.

- Dewi, Radix Prima dan Siti Nur Hidayah. 2019. *Studi Kasus Metode Penelitian Kualitatif*. STAIN Sorong.
- Djuyandi, Yusa. 2017. *Pengantar Ilmu Politik*. Rajawali Press, Depok.
- Fadli, Muhammad, dkk. 2018. *Keterlibatan Elit Lokal dalam Peningkatan Partisipasi Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara, Tahun 2015*. Jurnal Aristo, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Ghofur, Abdul. 2019. *Peran Ulama Sebagai Resolusi Konflik Carok di Desa Kaliboto Kidul, Lumajang*. Jurnal Dakwatuna, Vol. 05. No. 1.
- Ghony, M. Djunaidi. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
- Ghozali, M. Ikhsan. 2017. *Peranan Dai dalam Mengatasi Problem Dakwah Kontemporer*. Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan, Vol. 8 No. 2.
- Herlina, Lina. *Perspektif Islam tentang Konflik Sosial: Analisis terhadap Kondisi Konflik Politik di Media Sosial*. UIN Sunan Gunung Jati, Bandung.
- Ilaihi, Wahyu. 2006. *Manajemen Dakwah*. Kencana, Jakarta.
- Jaya, Diman. 2016. *Strategi Dakwah dalam Adat Katoba pada Masyarakat Muna di Desa Warambe*. IAIN Kendari, Sulawesi Tenggara.
- Kusnadi. 2002. *Masalah kerjasama Konflik dan Kinerja*. Taroda, Malang.
- Lauer, H. 2001. *Perspektif tentang Perubahan Sosial*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Mahadi, Ujang. 2015. *Komunikasi Politik Kiai pada Kampanye Pemilu*. Jurnal Addin, Vol. 9, No. 2.
- Mas' oed Mohtar dan Colin MacAndrew. 2008. *Perbandingan Sistem Politik*. UGM Press, Yogyakarta.

- Miles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. UI Press, Yogyakarta.
- Muhyiddin, Ahmad. 2016. *Peran Dai dalam Menanggulangi Perilaku Patologis sebagai Dampak Negatif Globalisasi*. Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 36 No.1.
- Mulyana, Deddy. 2013. *Komunikasi Politik, Politik Komunikasi*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Munir, M. 2009. *Metode Dakwah*. Kencana, Jakarta.
- Muthmainnah, Siti. 2014. *Peran Dakwah dalam Mengatasi Konflik-konflik Sosial Masa Kini*. Jurnal Dakwah Tabligh, Vol. 15 No. 2.
- Nimmo, Dan. 1993. *Komunikasi Politik Komunikator Pesan Media*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nirwana, Andri. 2016. *Akulturası Politik dalam Dunia Dakwah*. Jurnal Substansia, Vol. 18, No. 02.
- Nuha, Ulin. *Peran Politik Kiai dalam Proses Politik di Partai Politik (Studi Kasus Peran KH. A. Haris Shodaqoh di Partai Persatuan Pembangunan)*. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/160785-ID-peran-politik-kiai-dalam-proses-politik-pdf> pada Jum'at, 28 Mei 2021.
- Nurhadi, Sunarso. 2018. *Peran Kiai dalam Membangun Partisipasi Pemilih*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Vol. 3, No.2.
- Pahlevy. 2010. *Dakwah dan Politik: Pemikiran dan Kiprah KH. Mahrus Amin*. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Pemerintah Desa Bojong Kulur. 2015. *Susunan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Desa BojongKulur, Kecamatan Gunung Putri, KabupatenBogor*.



- <http://www.desabojongkulur.id/p/susunanpengurus-majelis-ulamaindonesia.html>. (diakses tanggal 29 Oktober 2020).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 112 Tahun 2014 tentang *Pemilihan Kepala Desa*, Bab II Pasal III.
- Pirol, Abdul. 2018. *Komunikasi dan Dakwah Islam*. Deepublish, Yogyakarta.
- Putra, Robby Aditya. 2017. *Manajemen Konflik dalam Film My Name is Khan dalam Perspektif Konsep Dakwah*. Jurnal Ath-Thoriq, Vol. 01, No. 02.
- Rahardjo, Mudjia. 2017. *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif; Konsep dan Prosedurnya*. UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Razzaq, Abdur. 2017. *Dakwah dan Pemikiran Politik Islam: Kajian Teoritis dan Empiris*. Noerfikri Offset, Palembang.
- Rosa, Andi. 2014. *Politik Dakwah dan Dakwah Politik di Era Reformasi Indonesia*. Jurnal Walisongo, Vol. 22, No. 01.
- Santoso, Rudi dan Fathul Mu'in. 2020. *Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung Menghadapi Era Disrupsi Informasi*. Jurnal Ath-Thoriq, Vol. 04, No. 01.
- Shaleh, Rosyad. 1977. *Manajemen Dakwah Islam*. Bulan Bintang, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1992. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press, Jakarta.
- Surbakti, Ramlan. 2007. *Memahami Ilmu Politik*. Grasindo, Jakarta.
- Sujarwo dan Basrowi. 2009. *Manajemen Penelitian Sosial*. Mandar Maju, Bandung.

- Syukir, Asmuni. 1983. *Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam*. Al- Ikhlas, Surabaya.
- Trans, 2018. “Ulama & Tokoh Agama, Darurat terjun ke dunia politik, jangan hanya jadi penonton”, <https://www.transbojonegoro.com/2018/03/para-santri-ulama-dan-tokoh-agama-darurat-terjun-ke-dunia-politik-jangan-hanya-jadi-penonton/>, (diakses pada tanggal 15 Januari 2021, pukul 11.20 WIB)
- Varma, SP. 2016. *Teori Politik Modern*. Raja Grafindo, Depok.
- West, Richard dan Lynn H. Turner. 2017. *Pengantar Teori Komunikasi*. Salemba, Jakarta.
- Zumaro, Ahmad. 2018. *Politik sebagai Instrumen Dakwah dalam Meminimalisir Kemungkaran*. Jurnal Dakwah dan Komunikasi Ath-Thoriq, Vol. 02, No. 02.